

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
OBJEK WISATA AIR TERJUN CEURACEU EMBON DI DESA
ALUE JANG KECAMATAN PASIE RAYA
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**NOVIA ELISA
NIM. 180802080**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program studi ilmu administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novia Elisa
NIM : 180802080
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Alue Jang, 31 Maret 2000
Alamat : Aceh Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2022

Yang menyatakan,




NOVIA ELISA
NIM. 180802080

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
OBJEK WISATA AIR TERJUN CEURACEU EMBON
DI KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NOVIA ELISA

NIM. 180802080

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

pembimbing II



Dr. Bustami Usman, S.H., S.AP., M.Si.

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.

NIP. 196110051982031007

NIP. 199011192022031001

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
OBJEK WISATA AIR TERJUN CEURACEU EMBON
DI DESA ALUE JANG KECAMATAN PASIE RAYA KABUPATEN ACEH
JAYA**

SKRIPSI

Telat Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu
Administrasi Negara

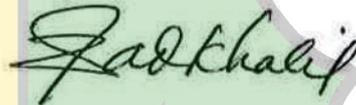
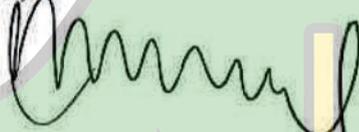
Pada Hari/Tanggal : 27 Juli 2022 M

Banda aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Bustami Usman, S.H., S.AP., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I,

Penguji II



Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Khalida Ulfa, M.IP.
NIP. -

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewl, S.Ag., M. Hum.
NIP.19730732000032002

ABSTRAK

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang harus terus dikembangkan sebagai sumber pendapatan. Kabupaten Aceh Jaya memiliki banyak potensi wisata salah satunya adalah wisata alam air terjun ceuraceu embon. Objek wisata air terjun ceuraceu embon belum sepenuhnya dikelola dengan baik seperti belum adanya sarana dan prasarana yang memadai di tempat wisata, sehingga perlu melakukan kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama yang dilakukan untuk mengelola dan mengembang objek wisata yang lebih maju. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata yaitu dengan melibatkan pemerintah, non pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Qanun kabupaten Aceh Jaya No 10 tahun 2019 Tentang pariwisata halal. Stakeholder yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan wisata adalah Dinas pemuda dan Olahraga, Bank Aceh, Kepala Desa Alue Jang, Kelompok Sadar Wisata, dan masyarakat sekitar. Objek wisata alam air terjun ceuraceu embon belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk melancarkan aktivitas kegiatan wisata. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi pengelolaan dan pengembangannya sudah berjalan dengan baik karena telah melibatkan pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat. Akan tetapi untuk melancarkan aktivitas berwisata perlu adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai.

Kata kunci: Collaborative Governance, Wisata



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ceuraceu Embon Di Kabupaten Aceh Jaya*. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendidik umatnya menjadi generasi yang paling baik di muka bumi ini. Skripsi ini merupakan sebuah karya penelitian ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan dari beberapa pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan yang sangat tinggi peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tiada henti peneliti ucapkan yaitu kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Asnita dan ibunda Yusniati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada keluarga peneliti yaitu kakak dan abang tersayang (Nurbaiti, Maulida Wulandari dan Rizky Andrean) serta saudara-saudara lainnya. Izinkan peneliti menyampaikan

penghargaan yang begitu tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada beberapa pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini :

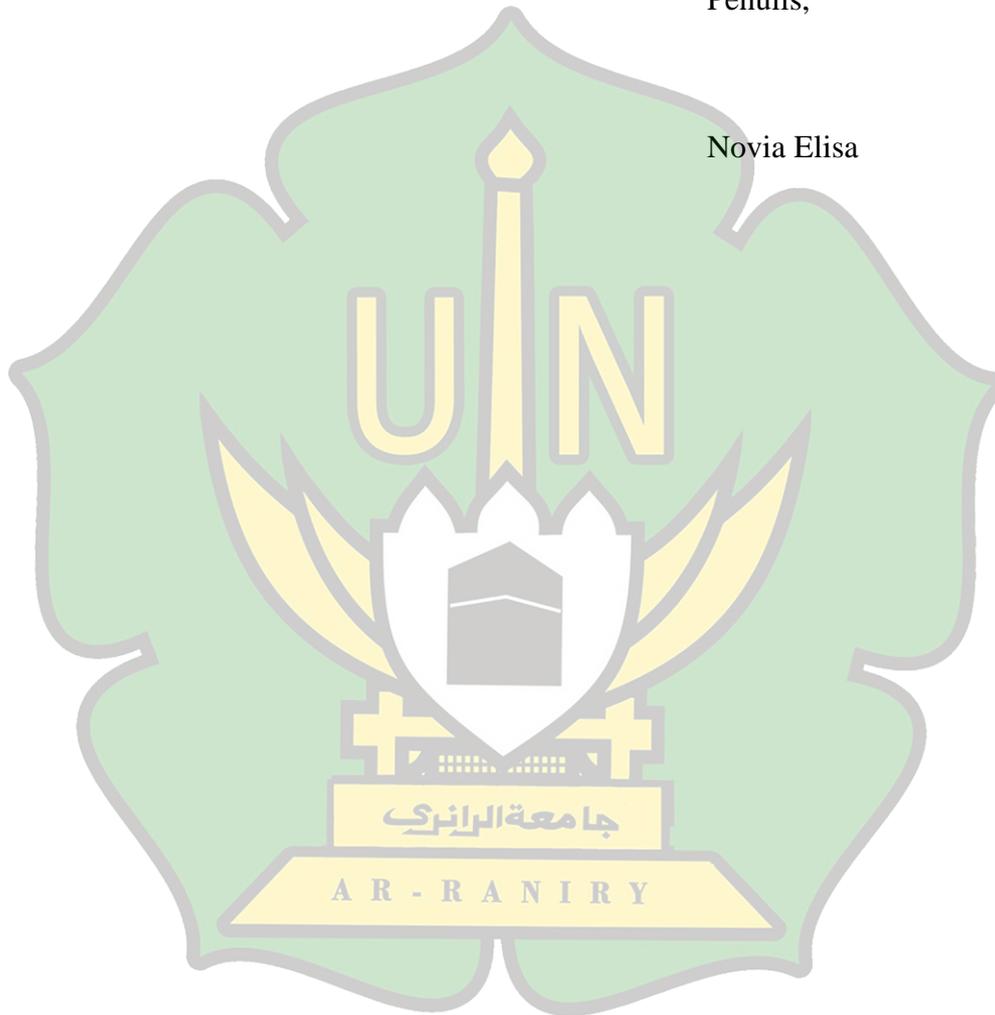
1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi S. Ag. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Eka Januar M. Soc. Sc., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Siti Nur Zalikha, M. Si. selaku sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang sangat besar peneliti ucapkan kepada Dr. Bustami Usman, S. H., S. A. P., M. Si. dan Zakki Fuad Khalil, S. IP., M. Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, sarana dan motivasi dalam proses bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah membantu maupun mensupport peneliti dalam pembuatan skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini

masih ada kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharap kritikan dan saran yang membangun semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh 05 Juli 2022
Penulis,

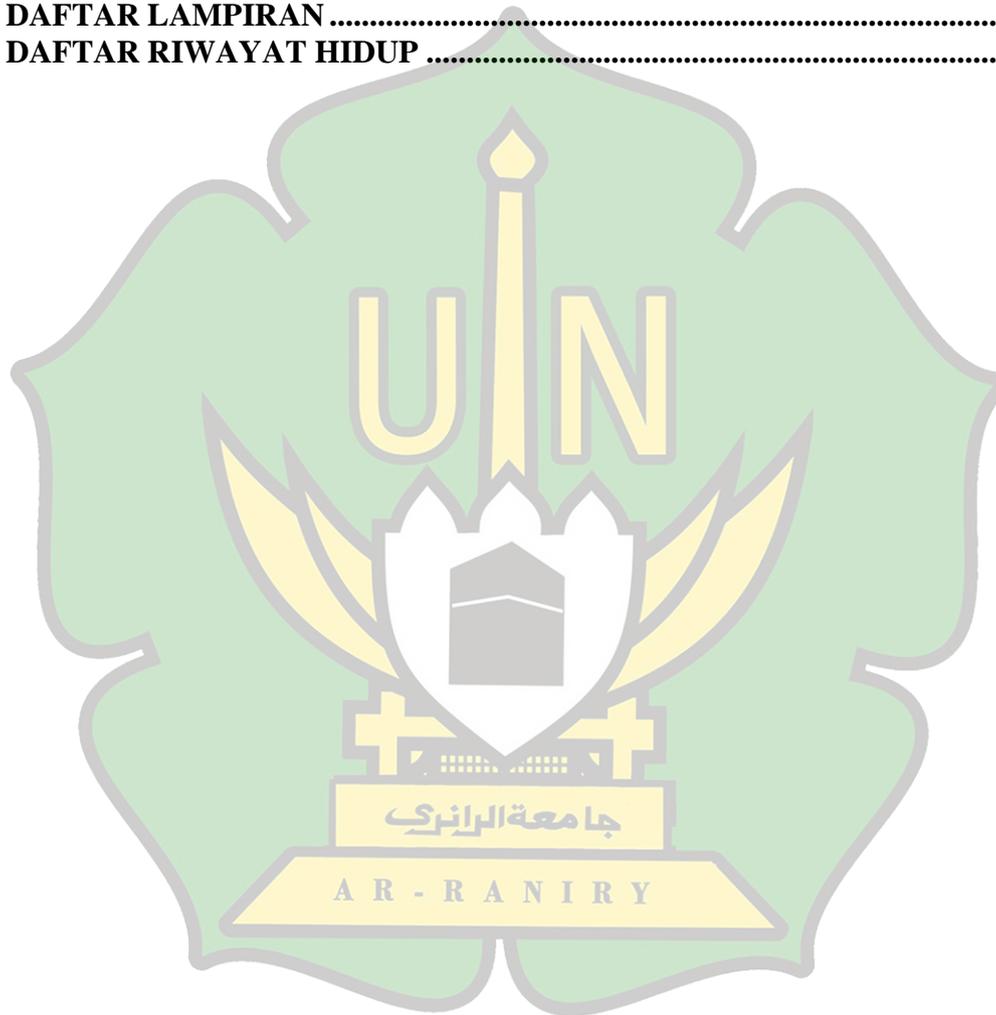
Novia Elisa



DAFTAR ISI

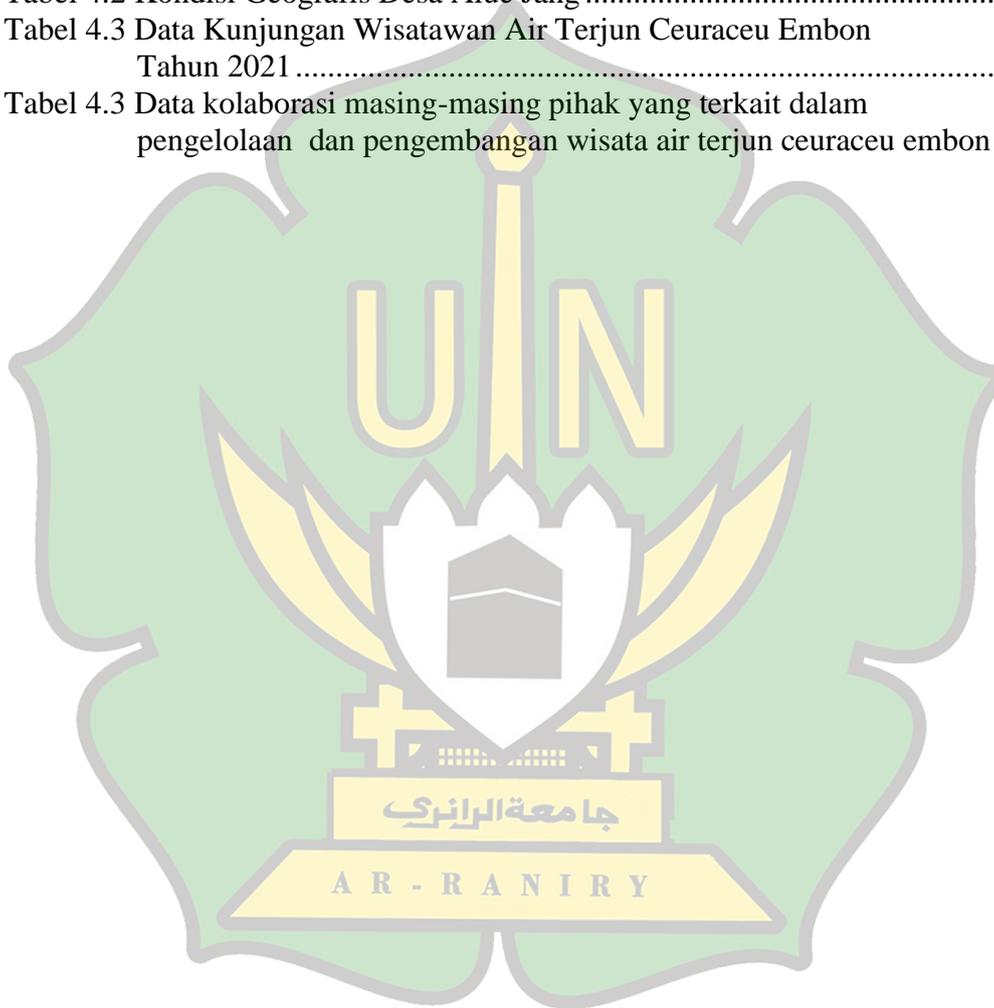
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Masalah.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Teori Collaborative Governance.....	11
2.3 konsep Pengelolaan Pariwisata.....	17
2.4 Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian.....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Sumber Data.....	30
3.5 Informan Penelitian.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya.....	36
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Jaya.....	39
4.1.3 Gambaran Umum Kelompok Sadar Wisata.....	40
4.1.4 Gambaran Umum Air Terjun Ceuraceu Embon.....	42
4.2 Pembahasan.....	43

4.2.1 Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ceuraceu Embon di Kabupaten Aceh Jaya.....	43
4.2.2 Kendala Dalam Pengelolaan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Dimensi dan indikator Collaborative governance.....	29
Tabel 3.2 Dimensi dan indikator kendala pengelolaan	29
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Nama-Nama Objek Wisata Alam Di Kabupaten Aceh Jaya.....	38
Tabel 4.2 Kondisi Geografis Desa Alue Jang	42
Tabel 4.3 Data Kunjungan Wisatawan Air Terjun Ceuraceu Embon Tahun 2021	53
Tabel 4.3 Data kolaborasi masing-masing pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon..	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance	15
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4. 1 Struktur organisasi Kelompok Sadar Wisata	40
Gambar 4. 2 Musyawarah Bersama	50
Gambar 4. 3 Surve langsung dari DISPORA Dan Bank Aceh	52
Gambar 4. 4 Sosialisasi dan Pembinaan Dari Pemerintah	55
Gambar 4. 5 Pemberian Bot Fiber.....	58
Gambar 4. 6 Wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal	63
Gambar 4. 7 Bot Fiber.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5. 1 Surat Keputusan Dekan Fisip	75
Lampiran 5. 2 Surat Penelitian.....	76
Lampiran 5. 3 Surat Hasil Penelitian dari DISPORA	77
Lampiran 5. 4 Surat Hasil Penelitian dari Bank Aceh	78
Lampiran 5. 5 Surat Hasil Penelitian dari POKDARWIS	79
Lampiran 5. 6 Surat Hasil Penelitian Dari Kepala Desa Alue Jang.....	80
Lampiran 5. 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal.....	81
Lampiran 5. 8 SK Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga	82
Lampiran 5. 9 Dokumentasi Saat Penelitian	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu gejala yang terjadi dimuka bumi ini yang timbul karena adanya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata selalu berkaitan dengan produk serta jasa yang dikelola oleh manusia. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan telah terjadi salah satu industri terbesar di dunia yang merupakan andalan dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Pertumbuhan pariwisata yang sangat cepat, telah menarik perhatian Indonesia khususnya Provinsi Aceh. Melihat kemajuan industri pariwisata yang begitu pesat, pada Tahun 2006 Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Daerah Aceh yang memberikan kesempatan bagi masing-masing daerah untuk mengelola dan mengembangkan sendiri potensi pariwisata yang ada di daerahnya. Adanya UU No. 11 tahun 2006 memberikan kesempatan kepada Provinsi Aceh untuk mengembangkan dan mengelola sendiri potensi alam dan budaya yang dimilikinya.¹

Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan adalah Aceh. Terutama daerah Aceh Jaya. Aceh Jaya adalah sebuah daerah yang diresmikan pada tanggal 10 April Tahun 2002. Kabupaten Aceh Jaya

¹ Ni Putu Eka Oktavianti, Dkk, *Potensi Wisata Alam Air Terjun Kuning Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Di Kawasan Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 10, no. 2 (2019): hal.136.

yang merupakan daerah pesisir Barat Pantai Sumatera dengan panjang garis pantai lebih kurang 160 km. Aceh Jaya memiliki luas wilayah 3.812,99 km² dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 21,71 jiwa/km² dan populasi penduduk mencapai 86,058 jiwa. Wilayah administrasi yang terdiri dari 9 kecamatan, 21 kemukiman dan 172 desa. Rata-rata dengan mata pencaharian dari sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Melihat keadaan geografis tersebut maka tentu aceh jaya dari segi sumber daya alam mempunyai tempat yang sangat menarik. Maka tidak heran saat ini Aceh Jaya memiliki 57 objek wisata. Keberadaan wisata yang dimiliki oleh Aceh Jaya salah satunya seperti Air Terjun Ceuraceu Embon.²

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif, bahwa kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dipimpin oleh seorang Menteri.³ Di tingkat Kabupaten/Kota, lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan kepariwisataan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR). Namun pada daerah-daerah yang tidak memiliki DISBUDPAR secara khusus, maka lembaga yang mengurus kepariwisataan adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) seperti Aceh

² Badan Pusat statistik (BPS), Aceh Jaya dalam angka 2017. Badan Pusat Statistik Aceh Jaya. <https://acehjayakab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2021&Publikasi%5BkataKunci%5D=&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan judul%5D=2017&publikasi%5BKataKunci%5D=aceh+jaya+dalam+angka&yt0=Tampilkan>. (Diakses pada tanggal 5 November 2021).

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata

Jaya. Berdasarkan Qanun kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Aceh jaya.

Aceh jaya memiliki beberapa objek wisata salah satunya adalah wisata air terjun Ceuraceu Embon yang berada di Desa Alue Jang, Kecamatan Pasie raya, Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal. Objek wisata air terjun sering didatangi oleh wisatawan dari berbagai daerah baik itu wisatawan lokal yang berasal dari Aceh maupun wisatawan mancanegara. Dengan keunikan yang dimiliki, tentunya dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung pada objek wisata ini karena tergiur dengan keindahan alam yang dimiliki sehingga sering kali wisatawan yang berkunjung menikmati keindahannya dengan menghabiskan malam di Air Terjun Ceuraceu Embon dengan berkemah, berenang, memancing ikan dan lain sebagainya.

Wisata air terjun ceuraceu embon saat ini masih belum sepenuhnya dikelola dan dikembangkan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok sadar wisata air terjun ceuraceu embon Kabupaten aceh jaya (10 Mei 2022) menyatakan bahwa masih banyak fasilitas yang dibutuhkan seperti musalla, ruang ganti pakaian, pondok santai, dermaga, pos pemantau, Mandi Cuci dan Kakus (MCK) dan aksesibilitas jalan seperti tangga untuk menanjak ke tempat air terjun ceuraceu embon. Dalam mengelola dan mengembangkan wisata air terjun ceuraceu embon, pemerintah setempat telah memberikan pinjaman kantor sekretariat untuk melancarkan segala urusan administrasi mengenai pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata

(POKDARWIS). POKDARWIS sebagai pengelola objek wisata air terjun ceuraceu embon telah diberi tugas berdasarkan SK dari pemerintah Kabupaten untuk mengeksplorasi keindahan wisata alam tersebut ke media massa.

Pemerintah setempat juga bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang berada pada destinasi wisata sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata. Termasuk kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, dan media massa. Kemudian pemerintah setempat juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) serta Bank Aceh dalam upaya memberikan bantuan transportasi berupa bot fiber guna untuk membawa para wisatawan yang ingin berkunjung ke air terjun ceuraceu embon.

Potensi wisata menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat agar dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Objek wisata air terjun ceuraceu embon memiliki potensi yang sangat besar sehingga dengan adanya objek wisata yang dimiliki menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata itu sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi pengangguran dan lain sebagainya.⁴

Oleh sebab itu maka pemerintah harus mempunyai upaya dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik objek wisata yang baik di Aceh jaya khususnya di Desa Alue Jang. Dengan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) akan memudahkan proses pengelolaan dan pengembangan wisata yang semakin maju dan maksimal. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut.

Berdasarkan paparan diatas menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek wisata Air Terjun Ceuraceu Embon di Kabupaten Aceh Jaya”. Dalam penulisan proposal ini penulis mencoba menggali informasi mengenai kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, dan masyarakat dalam pengembangan wisata di Air terjun

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya:

1. Objek wisata air terjun ceuraceu embon memiliki potensi yang sangat besar. Hanya saja belum dikelola sepenuhnya dengan baik, masih banyak kebutuhan-kebutuhan seperti fasilitas, aksesibilitas yang belum memadai. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara beberapa pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Kelompok Dasar wisata dalam mengelola dan mengembang objek wisata air terjun ceuraceu embon.
2. Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti akan melihat bagaimana mekanisme kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon di Kabupaten Aceh Jaya
2. Apa saja kendala pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon?

1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana collaborative governance dalam pengelolaan wisata air terjun ceuraceu embon di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya. Kemudian juga sebagai pemahaman bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan lebih mendalam mengenai pengembangan wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam upaya pengembangan wisata. Disamping itu, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagaimana pengelolaan dan pengembangan wisata alam serta apa saja kendala dalam pengembangan wisata dan bagaimana collaborative governance dalam pengembangan wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberi dampak kesejahteraan,

kemanfaatan dan lapangan pekerjaan berdasarkan aktivitas-aktivitas wisatawan pada objek wisata alam di Aceh Jaya.

1.6 Penjelasan Istilah

Terkait adanya beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi maka dari itu peneliti ingin menjelaskan definisi tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahami.

1. Collaborative Governance merupakan cara pengelolaan pemerintah yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan diluar pemerintah atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.⁵
2. Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) adalah salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis dibidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh walikota. Serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap

⁵ Hardi warsono, Retno Sunu Astuti, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro press jalan Erlangga Barat VII No. 35 Semarang, 2020). Hal.41.

pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala.⁶

3. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah salah satu kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan dalam mendukung terciptanya iklim kondusif dan terwujudnya Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan) sehingga dapat mendorong dalam mengembangkan dan membangun kepariwisataan di suatu daerah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.⁷



⁶ windy Aswin Septian, "Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga (DIPORA) Dalam Pembinaan Atlet Di Kota Samarinda," *Journal Ilmu Pemerintahan* Volume 5 , (2017): hal.394.

⁷ Khairul Amri Assidiq, "Peran POKDARWIS Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Halal Di Desa Setanggor," *Journal Magister unran* Vol. 10, N (2021): hal.61.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Hariadi (2019), Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika proses pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba dalam a) pergerakan prinsip bersama pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak lain namun dalam deliberasi belum berjalan dengan baik karena jarang melakukan diskusi. b) motivasi bersama kepercayaan belum baik karena dalam dimensi kepercayaan bersama pemahaman, dan komitmen walaupun legitimasi internal sudah jelas. c) kapasitas melakukan tindakan bersama dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira kabupaten bulukumba sudah baik dari dimensi prosedur dn kesepakatan bersama namun belum baik dalam dimensi kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

2	Aziz Ar Rasyid dan Adianto (2021) , Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wisata toluk jangkang merupakan wisata yang memiliki konsep berwisata memadukan diam dengan budaya lokal. Konsep Collaborative Governance sangatlah berperan penting karena dalam penerapannya tidak hanya melibatkan antara pemerintah dan non pemerintah saja melainkan pihak-pihak lain.
3	zahratun Aeni dan Retno Sunu Astuti (2019), Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati).	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah dan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki sinergisitas dalam merumuskan perencanaan strategi dalam pengembangan pariwisata yang ada di daerah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada lokus penelitian. dimana penelitian ini berada di Aceh Jaya. Dan persamaannya terletak pada fokus penelitian dimana sama-sama meneliti di bidang potensi wisata.

2.2 Teori Collaborative Governance

2.2.1 Pengertian Collaborative Governance

Istilah collaborative Governance merupakan cara pengelolaan pemerintah yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan diluar pemerintah atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan gash).⁸

Dapat dipahami bahwa collaborative governance merupakan cara pengelolaan “suatu hal” yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung, maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Jhon Wanna mendefinisikan kolaborasi sebagai tindakan *joint-warking* yang melibatkan berbagai aktor, individu, grup, atau organisasi yang bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan tertentu. Model *triple helix* melihat inovasi sebagai hasil dari jaringan kerja sama antara A-B-G (*academician-business-government*), dimana dunia akademik berperan sebagai pemasok *knowledge* pihak industry sebagai lokus dari produksi menjadi pemanfaat *knowledge*, sementara pemerintah bertugas selaku fasilitator yang memungkinkan interaksi stabil antara pemasok dan

⁸ Hardi warsono, Retno Sunu Astuti, Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik (Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro press jalan Erlangga Barat VII No. 35 Semarang, 2020).

pemanfaat *knowledge*. Sebuah kolaborasi berhasil dilakukan tidak lepas dengan peran para *stakeholder* atau di dalamnya.⁹

Pada dasarnya konsep *Triple Helix* ini melibatkan kerjasama antara Pemerintah, swasta, dan Masyarakat untuk saling memberi dukungan serta perannya dalam pengembangan wisata. Sulistiyani menerangkan bahwa peran dari setiap aktor yang tergolong dalam Konsep *Triple Helix* yaitu Peran Pemerintah, Peran Swasta, dan Peran Masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dijelaskan sebagai berikut :¹⁰

1. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam suatu pembangunan yang akan dilakukan karena dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai implementator, monitoring, evaluasi, mediasi, formulasi, dan penetapan (Policy). Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dapat berupa peraturan hukum, penganggaran yang menyediakan berbagai fasilitas seperti Dana, jaminan, alat, teknologi, network, sistem manajemen informasi serta edukasi terhadap penetapan kebijakan yang akan dilakukan dalam melakukan suatu pembangunan,¹¹

⁹ Ketut Suwena and Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, vol. 2, 2019, <https://jurnalpangripta.malangkota.go.id/index.php/pangripta/index>.

¹⁰ M.PD Enza Resdiana. SE., M.AB, Tita Tanjung Sari, *Penguatan Tripel Helix Pada Sektor Pariwisata* (Universitas wiraraja Sumeneep, 2020). Hal.01.

¹¹ M.PD Enza Resdiana. SE., M.AB, Tita Tanjung Sari, *Penguatan Tripel Helix Pada Sektor Pariwisata* (Universitas wiraraja Sumeneep, 2020). Hal.02.

Dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa pemerintah banyak berperan pada penentu rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada pengambilan keputusan pendanaan. Untuk menjaga kualitas hasil pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas dan berkelanjutan terutama untuk mengontrol peran swasta supaya berjalan wajar tidak merugikan masyarakat.

2. Peran Swasta

Swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentu langkah bersama masyarakat. Peran demikian perlu untuk ditekankan supaya terjadi variasi analisis. Peran swasta dalam implementasi kebijakan mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses pembangunan dan pengembangan yang akan dilakukan. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi pihak swasta juga memberi andil dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh dari proyek-proyek dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi. Dengan demikian bentuk fasilitasi akan berupa penerjunan tenaga ahli dan terampil serta teknologi yang memadai.¹²

¹² M.PD Enza Resdiana. SE., M.AB, Tita Tanjung Sari, *Penguatan Tripel Helix Pada Sektor Pariwisata* (Universitas wiraraja Sumeneep, 2020). Hal.03.

3. Peran Masyarakat

Secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan akan tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan publik.

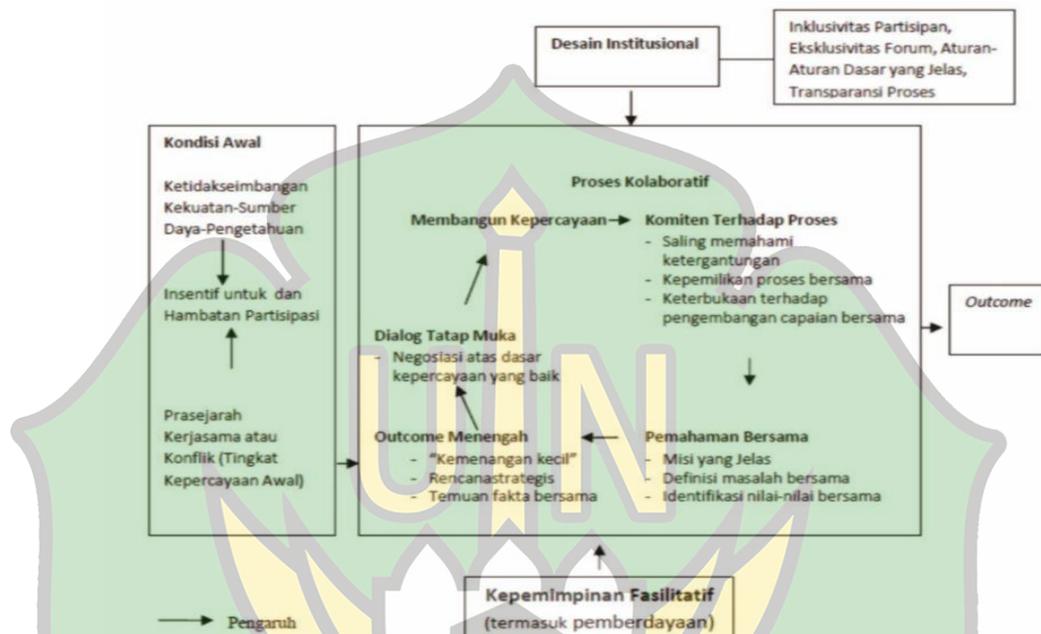
Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Partisipasi dalam pendanaan merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi potensi masyarakat yang akan diintervensi oleh kebijakan adalah untuk pengerahan dana masyarakat atau yang sering disebut dengan swadaya masyarakat. Peran masyarakat lain yang memiliki posisi yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan. Diantara masyarakat sendiri hendaknya tumbuh dan mengembangkan sistem kontrol yang sehat dalam masyarakat. Setiap orang akan melakukan aktivitas yang tidak merugikan suatu proses pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta.¹³

2.2.2 Proses Kolaborasi

Proses dari kolaborasi dilakukan di dalam beberapa tahapan. suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek

¹³ M.PD Enza Resdiana. SE., M.AB, Tita Tanjung Sari, *Penguatan Tripel Helix Pada Sektor Pariwisata* (Universitas wiraraja Sumeneep, 2020). Hal.04.

suatu pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap *stakeholder* yang berbeda satu dengan yang lainnya.¹⁴



Gambar 2.1
Model Collaborative Governance

Sumber : Ansell dan Gash

menurut Ansell dan Gash model *collaborative governance* merupakan serangkaian komponen-komponen yang berjalan membentuk suatu siklus, mempengaruhi satu sama lain, dan pada intinya adalah proses collaborative decision-making diantaranya sebagai berikut:

1. Dialog antar-muka (*face-to-face dialogue*)

¹⁴

R. Rindu Garvera, dkk, *collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa Mandiri*, Jurnal Ilmiah ilmu administrasi negara, Vol 8 Nomor 3 Desember 2021.

Komunikasi menjadi hal krusial dalam proses kolaborasi, karena adanya orientasi pembentuk konsensus. Komunikasi seringkali terbentuk melalui diskusi langsung (tatap muka) komunikasi yang terbuka selanjutnya mempengaruhi pembentukan kepercayaan antar-aktor.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Kegiatan yang terus menerus dilakukan dan perlu ditingkatkan. Membangun kepercayaan merupakan syarat untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen merupakan komponen penting sekaligus tantangan utama dalam proses kolaborasi. Komitmen dipengaruhi oleh komponen sebelumnya (membangun kepercayaan). Sedangkan faktor (di dalam komponen) yang mempengaruhi adalah adanya *mutual recognition* (mengenal bersama yang bersifat mutual) dan *joint appreciation* (apresiasi bersama) antar aktor. Selain itu, adanya *ownership the process* (rasa memiliki pada proses) yang diwujudkan dengan adanya pengaruh setiap aktor dalam memberi keputusan merupakan pendorong komitmen, namun memiliki dilemma, karena adanya perbedaan dan kompleksitas dalam kolaborasi.

4. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Dalam pengertian ini adalah *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (objektivitas umum) dan *shared*

vision (visi bersama). Adanya pemahaman bersama merupakan syarat yang diperlukan selama proses kolaborasi, sehingga tujuan bersama dapat terwujud. Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan tujuan, mendefinisikan permasalahan secara bersama, sehingga meminimalisir terjadinya saling tidak mengerti atau kesalahpahaman.

5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*).

Dampak yang dimaksud adalah yang terjadi selama proses kolaborasi, sehingga ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara ini menghasilkan feedbacks. Dampak positif lebih diharapkan, sebagai pendorong serta penjaga agar kolaborasi tetap berada pada jalurnya, sehingga disebut dengan “*small-wins*” atau kemenangan kecil.¹⁵

2.3 konsep Pengelolaan Pariwisata

2.3.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari Bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata Pari dan kata Wisata. Kata Pari berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata wisata berarti perjalanan. Menurut Wahab pariwisata mengandung tiga unsur antara lain: manusia yakni unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata, tempat yakni unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri dan waktu yakni unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut dan selama berdiam ditempat tujuan. Jadi pariwisata adalah salah satu industri baru yang mampu

¹⁵

Retno Sunu Astuti, Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan dalam hal mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.¹⁶

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal, Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten. Pariwisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.

Indikator pariwisata halal meliputi :

1. Destinasi.
2. Akomodasi.
3. Usaha makanan dan minuman.
4. Jasa pelayanan Kesehatan dan kecantikan halal dan.
5. Biro perjalanan.¹⁷

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaan dari pariwisata sangat rentan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam. Menurut Henderson pariwisata merupakan industri yang

¹⁶ Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), hal 21.

¹⁷ Republik Indonesia et al., "Dan Budaya Yang Dimiliki Kabupaten Aceh Jaya Merupakan Sumber Daya Dan Modal Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Sebagaimana Terkandung Dalam Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan , Pemerintah Kabupaten Aceh," no. 6 (2019).

selalu dihantui oleh bencana dan krisis, bahkan bisa dikatakan sangat rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya.

Pengelolaan suatu objek wisata merupakan hal terpenting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu pengelolaan haruslah dirancang secara matang agar tidak hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan pariwisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangun pariwisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapatkan manfaat yang positif.¹⁸

2.3.2 Jenis dan Macam pariwisata

Kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah ini umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginan. Di samping itu, untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, perlu pula dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lainnya,

¹⁸ Andi Hariadi, “*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba.*”

sehingga jenis dan macam-macam pariwisata yang dikembangkan akan dapat terwujud seperti yang diharapkan dari kepariwisataan itu sendiri. Sebenarnya pariwisata sebagai suatu gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain, misalnya :¹⁹

Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:

1. Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Denpasar, kepariwisataan kota Bandung.
2. Pariwisata regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.
3. Pariwisata nasional (*national tourism*) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam suatu wilayah negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negaranya sendiri tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
4. Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati

¹⁹ Ketut Suwena, Gst Ngr Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Lasaran 2017), hal 19.

batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN.

5. Kepariwisataan internasional (*international tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.²⁰

Menurut objeknya, dimana kegiatan pariwisata dibedakan menjadi :

1. *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
2. *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.
3. *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
4. *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
5. *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa

²⁰ Ketut Suwena, Gst Ngr Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Lasaran 2017), hal 20.

atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.

6. *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya *study tour*, *picnik*, dan lain-lain.
7. *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama islam, dan lain-lain.
8. *Marine tourism* merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.²¹

Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan, pariwisata ini dapat dibedakan menjadi :

1. *Individual tourism* yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.
2. *Family group tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh rombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
3. *Group tourism* yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan

²¹ Ketut Suwena, Gst Ngr Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Lasaran 2017), hal 21.

yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau *tour operator travel agent*.²²

2.3.3 Unsur-Unsur Pariwisata

Pada dasarnya bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari tiga unsur :

1. Manusia (unsur fisik insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata).
2. Tempat (unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri).
3. Waktu (unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan itu sendiri selama berdiam ditempat tujuan).²³

Faktor khas pada umumnya berkaitan dengan maksud bepergian, sifat sementara bepergian tersebut, penggunaan fasilitas wisata, dan yang dianggap paling penting yaitu faktor kenikmatan dan perasaan yang rileks berekreasi. Kita akui kedua faktor terakhir ini bukanlah faktor kepariwisataan yang mutlak (*sine qua non*) karena orang yang berpariwisata bisnis (misalnya pelajar) haruslah pula mereka itu tetap dianggap sebagai wisatawan, meskipun dalam beberapa hal kaidah kenikmatan dan rekreasi bukanlah tujuan utama kepergian mereka.

Sisi lain pariwisata hendaknya dilihat dari sudut pandangan negara penerima wisatawan. Di dalam konteks ini pariwisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut memberi andil dalam pembangunan sosial ekonomi, baik negara itu sudah maju atau sedang berkembang.

²² Ketut Suwena, Gst Ngr Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Lasaran 2017), hal 22.

²³ Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 13.

Istilah industri pariwisata mungkin terasa sebagai sebutan yang agak aneh bagi mereka yang selama ini menganut batasan pengertian industry klasik, yang senantiasa berarti suatu proses dengan maksud untuk meningkatkan kekayaan. Struktur industri dapat berbeda menurut hakikat hasil produksinya dan pasaran tempat hasil produksi itu dijual. Juga struktur industri yang dibedakan berdasarkan bahan baku yang dipergunakan dan kondisi tempat bahan itu diolah.²⁴

Unsur-unsur pariwisata yang mutlak sangat menentukan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah unsur pengelolaan dari :

1. Daya tarik wisata (*Attractions*)

Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. *Attractions* atau atraksi adalah produk utama sebuah destinasi. Atraksi berkaitan dengan *what to see* dan *what to do*. Apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Seharusnya sebuah atraksi harus mempunyai nilai diferensiasi yang tinggi. Unik dan berbeda dari daerah atau wilayah lain.²⁵

2. Fasilitas dan jasa pelayanan wisata (*Amenities*)

²⁴ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 14.

²⁵ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 15.

Amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran, dan *rest area*.²⁶

3. Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata (*Accessibility*)

Accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Banyak sekali wilayah di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan, tetapi tidak mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga ketika diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya. Perlu juga diperhatikan bahwa akses jalan yang baik saja tidak cukup tanpa

²⁶

Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 16.

diiringi dengan ketersediaan sarana transportasi. Bagi *individual tourist*, transportasi umum sangat penting karena kebanyakan mereka mengatur perjalanannya sendiri tanpa bantuan *travel agent*, sehingga sangat bergantung kepada sarana dan fasilitas publik.²⁷

4. Keramahan tamahan (*Ancillary = hospitality*)

Keramah tamahan berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang yang mengurus destinasi tersebut. Ini menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas dan amenities yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus maka kedepannya pasti akan terbengkalai. Organisasi sebuah destinasi akan melakukan tugasnya seperti sebuah perusahaan. Mengelola destinasi sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat sekitar, wisatawan, lingkungan dan para *stakeholder* lainnya.²⁸

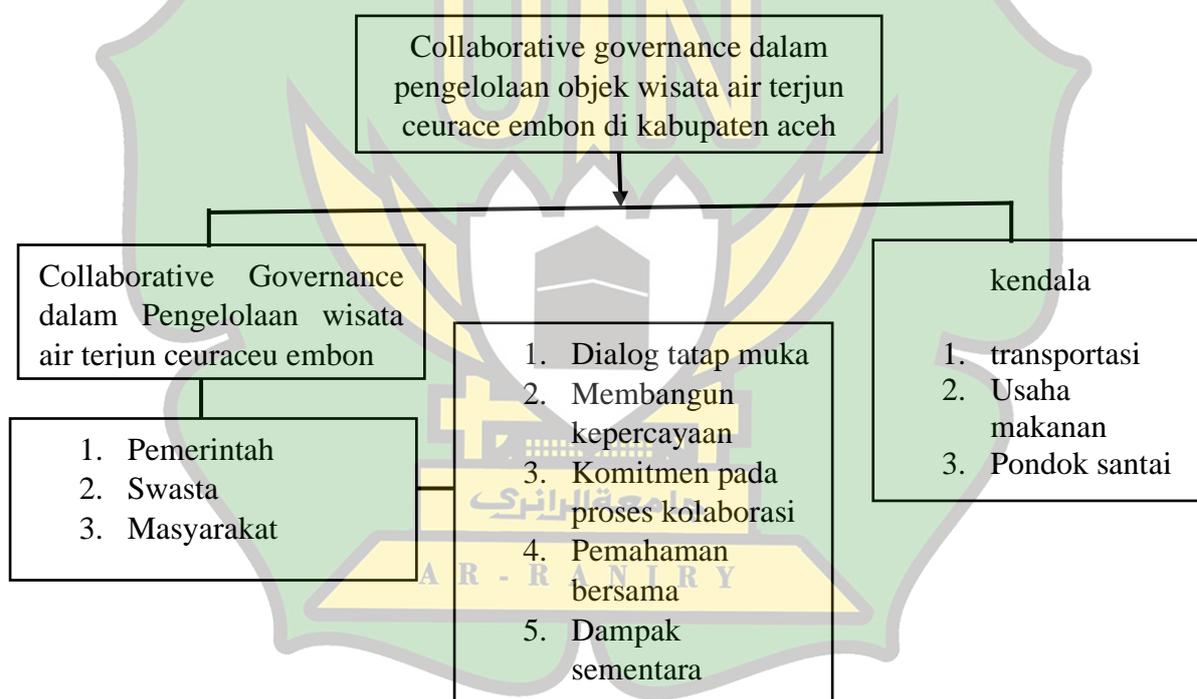
2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungan dengan perumusan masalah. Mengacu dalam konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi merupakan suatu tindakan untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengelola, mengembangkan, menata

²⁷ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 17.

²⁸ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hal 18.

dan mengatur semua urusan Bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien.²⁹ dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Ceuceu Embon di Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan latar belakang dan teori-teori diatas maka kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini dengan melihat beberapa indikator pada Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Ceuraceu Embon di Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

²⁹

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan yang dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan, terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.³⁰

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dapat dikatakan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti menentukan kemana arah

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: ALFABETA BANDUNG, 2013). Hal.205.

penelitiannya.³¹ Fokus penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ceuraceu embon di Kabupaten Aceh jaya.

Tabel 3. 1
Dimensi dan Indikator Collaborative Governance

No	Dimensi	indikator	sumber
1	Collaborative Governance	a. Dialog antar-muka b. Komitmen pada proses kolaborasi c. Pemahaman bersama d. Membangun kepercayaan e. Dampak sementara	Ansell dan Gash, (2007:544) Proses <i>Collative decision-making</i>

Tabel 3.2
Dimensi dan indikator kendala pengelolaan

No	Dimensi	indikator	Sumber
2	kendala	a. Transportasi b. Pondok wisata c. Usaha makanan	Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Gampong Alue jang Kecamatan pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya. Gampong Alue jang memiliki tiga dusun yaitu dusun media, dusun Suka Ramai, dan dusun Jaya Makmur.

³¹ Notoatmodjo and M M.A., “*Metodologi Penelitian*,” *Rake Sarasin* (2018): hal.54–68, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut: pertama, karena wisata air terjun ceurace embon memiliki keindahan alam yang membuat banyak wisatawan yang berkunjung hanya saja belum dikelola sepenuhnya dengan baik. Kedua, karena Desa Alue Jang sudah termasuk salah satu desa wisata di Kabupaten Aceh Jaya. Ketiga, jarak tempat tinggal dengan lokasi penelitian sangat dekat, kemudian lebih mudah dijangkau serta ekonomis.

3.4 Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon di kabupaten aceh jaya.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengelola pariwisata kabupaten aceh jaya.³²

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen utama dalam penelitian. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan seorang informan yang memiliki pengetahuan tentang data atau informasi yang berkaitan dengan masalah

³² Andi Hariadi, “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). Hal.27.

yang akan diteliti. penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya orang yang dijadikan informan dalam penelitian tersebut dianggap paling tau dan mengerti tentang apa yang menjadi objek penelitian.³³

Tabel 3. 2
Informan penelitian

No	Informan	Jumlah	Alasan
1	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya	1 Orang	Pemerintah yang telah memberikan bantuan untuk pengelolaan dan pengembangan objek wisata air terjun ceuraceu embon.
2	Kepala Bank Aceh Cabang Kabupaten Aceh Jaya	1 Orang	Sebagai lembaga mitra pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui program CSR.
3	Kepala Desa Alue Jang	1 Orang	Pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan wisata air terjun ceuraceu embon.
4	Ketua Kelompok Sadar Wisata Ceuraceu Embon	1 Orang	Ketua pengelolaan wisata air terjun ceuraceu embon.
5	Masyarakat Tour Guide	3 Orang	Pembawa wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi wisata air terjun ceuraceu embon.
6	Pengunjung/wisatawan	3 Orang	Wisatawan yang berkunjung ke air terjun ceuraceu embon untuk menikmati keindahan alam.

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti Tahun 2022

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi

³³ Andi Hariadi, "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). Hal.28.

berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan agar saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

1. *Observasi* (pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengamatan langsung ditempat dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan kolaborasi pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan pariwisata air terjun ceuraceu embon.
2. *Interview* (Wawancara), wawancara dilakukan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Bank Aceh, Kelompok Sadar Wisata, Kepala Desa, Masyarakat dan Pengunjung, secara terstruktur. Kegiatan wawancara terstruktur ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan.³⁴ Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara berstruktur yaitu pertanyaan telah dirumuskan sebelum berhadapan dengan informasi, agar bahan pengolahan data dapat lebih mudah. Selain ini peneliti juga akan menggunakan metode wawancara tak berstruktur berguna untuk memahami karakter asli sebuah komunitas sosial karena jabatan akan lebih terbuka.³⁵

³⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga,2009), hal.107.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.201.

3. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang diambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengelola pariwisata air terjun ceuraceu embon di Kabupaten Aceh Jaya.³⁶

3.7 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dilakukan setelah semua data primer dan sekunder terkumpul, yang kemudian diolah kembali oleh penulis. Analisis berarti mengolah data, mengorganisasir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama.³⁷ Dengan kata lain data mengenai collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon yang sudah dikumpulkan secara keseluruhan ditarik kesimpulannya secara general. Data tersebut menjawab semua rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal dan juga merupakan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui.³⁸

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesisi. Menurut Miles dan Huberman (dalam buku Sugiyono) mengemukakan bahwa aktivitas

³⁶ Sugiyono, "Prosedure Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): hal.1689–1699.

³⁷ Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010),hal.122.

³⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Jaya Utama, 2005), hal 120.

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.³⁹

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu dengan tahapan pengumpulan data.

1. *Data collecting* (Pengumpulan Data) merupakan tahap pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat diamati misalnya mengenai perasaan dan hati.
2. *Data reduction* (Reduksi Data) yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Di dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan,, juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan

³⁹ Sugiyono, "Prosedure Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–1699.

reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. *Data display* (Penyajian Data) menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh karena itu agar dapat melihat gambar keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.
4. *Klasifikasi data* (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi) sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data yang diperoleh dari pihak sejak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan yaitu akan lebih tetap lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasikan selama penelitian berlangsung hingga akhir tercapai kesimpulan terakhir.⁴⁰

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R@D*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Mula dibangun oleh Sultan Saidil Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1637 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama “Negeri Daya” muncul pada akhir abad ke-16 M dengan rajanya Sultan Alaidin Riayat Syah bergelar Poteumeureuhom Daya. Kerajaan ini berlokasi di wilayah kecamatan jaya sekarang ini.

Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah kabupaten Aceh jaya sekarang ini merupakan onderafdeeling dari *Afdeeling Westkust Van Atjeh* (Aceh Bara), salah satu dari tempat afdeeling wilayah keresidenan Aceh. *Afdeeling Westkust Van Atjeh* merupakan suatu daerah administrative yang meliputi wilayah pantai barat Aceh dari Gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan kepulauan Simeulue. Afdeeling ini dibagi menjadi enam onderafdeeling yaitu :

1. Meulaboh dengan ibukotanya Meulaboh.
2. Tjalang, dengan ibukotanya Tjalang (sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah lhok kruet). Landchapnya meliputi Keulung, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Kreung Sabee, Dan Teunom.

3. Tapak Tuan dengan ibukotanya Tapak Tuan.
4. Simeulue dengan ibukotanya Sinabang.
5. Zuid Atjeh dengan ibukotanya Bakongan.
6. Singkil dengan ibukotanya Singkil.

Di zaman penjajahan jepang struktur wilayah administratif tidak banyak mengalami perubahan kecuali pergantian cara penamaan wilayah. Afdeeling diubah menjadi Bunsyu yang dikepalai seorang bun syucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai seorang Guncho, dan landscape menjadi Son yang dikepalai seorang Soncho. Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Utara, wilayah Barat dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh barat terdiri dari 3 wilayah, yaitu Meulaboh, Calang, dan Simeulue. Wilayah Calang menjadi daerah otonom setelah memekarkan diri dari kabupaten induk menjadi kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 dan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2002.

Wilayah administratif kabupaten Aceh jaya terdiri dari atas 9 kecamatan yaitu : Teunom, Krueng Sabee, Panga, Setia Bhakti, Sampoiniet, Jaya, Indra Jaya, Darul Hikmah dan Pasie Raya. Kabupaten Aceh Jaya berada dalam iklim tropis yang hangat dan lembab.⁴¹ Kabupaten Aceh Jaya memiliki beragam potensi

⁴¹ <https://www.acehjayakab.go.id> (Diakses pada tanggal 02 Juni 2022)

pariwisata salah satu yang dominan berasal dari objek wisata alam. Adapun objek wisata alam sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini.⁴²

Tabel 4. 1
Nama-Nama Objek Wisata Alam Di Kabupaten Aceh Jaya

No	Nama Objek Wisata
1	Panoramapuncak geurute
2	Puloe tsunami ujong seudhen
3	Wisata alam pemandian krueng sabet
4	Situs makam po teumereuhom
5	Desa wisata kerajinan songket
6	Desa wisata kerajinan tudung saji
7	Wisata bahari babah ie
8	Guha teumiga
9	Puloe keluang
10	Wisata pantai gampong baro
11	Wisata agro gampoeng boeh giri
12	Pantai lhok maneh
13	Kuala lambusoe
14	Puloe raya beach
15	Pantai pasie saka
16	Ceuraceu klah
17	CRU sarah deu
18	Agroe wisata nilam ranto sabon
19	Puloe keuh
20	Kuliner ikan asin
21	Kawasan kuliner gunung ceuncrang
22	Kawasan wisata lhok geulumpang
23	Rest area rigaih
24	Puloe resam
25	Conservasi hutan manggrove
26	Pantai ujong peusong
27	Keureumo agam lageun
28	Ujong baroh hill
29	Pantai panorama bate tutong
30	Taman memorial tsunami calang
31	Pasie luah
32	Kawasan pelabuhan lhok kubu
33	Situs kapal nissero

⁴² Ayu Karlina, "Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Aceh Jaya," *Skripsi* (2019): 1–66, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10165/>.

34	Konservasi penyu aron meubanja
35	Pantai ceumara lancingsira
36	Ceuraceu alue tengah
37	Laot bhe
38	Taman bunga celosia garden
39	Laot nie pineng suasa
40	Pasie tulak bala
41	Pantai lhueng gayo
42	Batu sumpah
43	Kuala krueng teunom
44	Air terjun Ceuraceu embon
45	Ceuraceu alue minyak sapi
46	Arung jeram krueng sikuleeh

Sumber : Dinas Pemuda dan OlahRaga

4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Jaya

Visi :

Mewujudkan pembangunan rakyat aceh yang sehat, kejayaan, tangguh, infrastruktur dan informatika (gerbang raja sejati).

Misi :

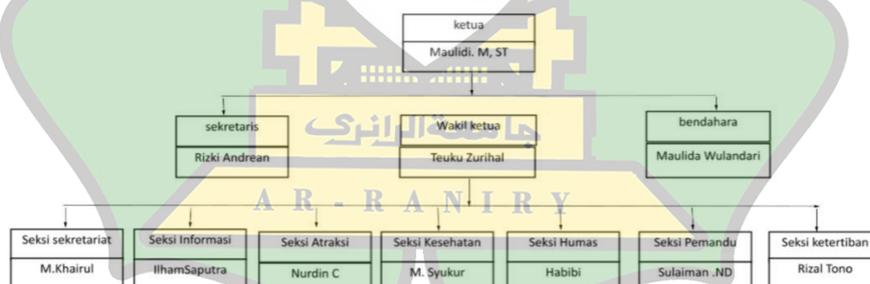
1. Meningkatkan mutu dan meningkatkan pelayanan ekonomi sampai ke rumah masyarakat.
2. Memperluas pertumbuhan ekonomi mikro dalam kerangka kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor pertumbuhan PDRB.
3. Kejayaan agama dapat ditingkatkan melalui pembangunan pendidikan agama islam, pembangunan sarana ibadah.
4. Peningkatan pembangunan yang tangguh disegala bidang, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengembangan pengeluaran darurat alam dan kerusakan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan mutu pendidikan termasuk pendidikan umum, sarana dan prasarana dan daya penguatan kompetensi pembinaan pemuda dan olahraga serta sosial budaya.
6. Menciptakan pemerintahan yang baik mengatur tata kelola yang bersih, efektif, koordinasi dan terpercaya.⁴³

4.1.3 Gambaran Umum Kelompok Sadar Wisata

Kelompok sadar wisata yang sering disebut dengan (POKDARWIS) adalah lembaga ditingkat asyarakat yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap wisata yang berperan untuk menggerakkan dan mendukung terciptanya iklim kondusif serta berkembangnya kepariwisataan dan menciptakan kondisi sapta sapta wisata yang ada di kawasan air terjun ceuraceu embon.

a. Struktur organisasi kelompok sadar wisata



Gambar 4. 1 Struktur organisasi Kelompok Sadar Wisata

Sumber : Kelompok Sadar Wisata

⁴³ Usman Fauzi, “Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda aceh, 2020). Hal 34.

b. Tugas dan fungsi

1. Ketua

Memimpin kelompok sadar wisata, memberikan pengarahan kepada anggota, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan serta bertanggung jawab mengenai keuangan dan pelaksanaan kegiatan, memimpin pertemuan diskusi kelompok, menandatangani surat-surat, berkoordinasi dan bertanggungjawab kepala kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga

2. Wakil ketua

Membantu tugas ketua, mewakili ketua dalam berbagai kegiatan apabila ketua berhalangan hadir, bertanggungjawab kepada ketua.

3. Sekretaris

Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi, mempersiapkan bahan-bahan pertemuan kelompok, mengadakan hubungan dan berkoordinasi dengan instansi atau pihak luar terkait, menghimpun seluruh laporan dari anggota, mencatat seluruh hasil pertemuan-pertemuan diskusi, bertanggung jawab kepada ketua.

4. Bendahara

Bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran uang, mengusahakan dana bantuan dari pihak lain, bertanggung jawab kepada ketua.

5. Seksi-seksi

Membantu upaya penciptaan keamanan dan ketertiban disekitar lokasi wisata, menggali membina dan mengembangkan berbagai potensi sumber daya wisata dan keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat, mempromosikan berbagai daya tarik wisata dan keunikan lokal, menjalin hubungan dan kerjasama/kemitraan dalam kaitannya dengan pengembangan wisata

4.1.4 Gambaran Umum Air Terjun Ceuraceu Embon

Wisata air terjun ceuraceu embon berjarak sekitar 46,7 Km atau sekitar satu jam lebih perjalanan dari ibu kota Aceh Jaya. Wisata air terjun ceuraceu terletak di desa Alue Jang. Desa Alue Jang merupakan desa yang ada di kabupaten Aceh jaya Provinsi Aceh. Desa alue jang terdiri dari 3 dusun, yakni : dusun sukaramai, dusun media dan dusun jaya baru. Desa Alue jang memiliki jumlah penduduk sebesar 614 jiwa orang dengan jumlah perempuan 305 orang dan jumlah laki-laki 50 %. Mayoritas penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani dan swasta.

Tabel 4. 2
Kondisi Geografis Desa Alue Jang

Batas	Desa/Kecamatan	Wilayah
Barat	Gampong Alue Meraksa	Kab. Aceh Jaya
Timur	Gampong Sarah Raya	Kab. Aceh Jaya
Utara	Kabupaten Pidie	Kab. Aceh Jaya
Selatan	Gampong Ceuraceu	Kab. Aceh Jaya

Sumber : Profil Desa Alue Jang

Pada bidang pariwisata, desa alue jang memiliki potensi wisata yang berbasis alam. Pada bidang yang berbasis alam sendiri dikarenakan desa Alue Jang memiliki kontur wilayah berbukit dan pegunungan. Maka daya tarik wisatanya antara lain wisata gunung atau wisata air terjun yang saat ini memang belum terjamah sehingga telah dikenal dari berbagai wisatawan baik lokal maupun mancanegara

4.2. Pembahasan

4.2.1 Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ceuraceu Embon di Kabupaten Aceh Jaya

Stakeholder dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, keterlibatan, atau dipengaruhi oleh kegiatan/program pembangunan.⁴⁴ Pada pengelolaan pariwisata pemangku kepentingan dibagi menjadi stakeholder primer/utama sebagai individu atau kelompok yang mendukung sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan fungsi organisasi sektor pariwisata, dan stakeholder sekunder sebagai individu atau kelompok yang tidak penting untuk kelangsungan hidup organisasi tetapi yang di masa lalu, sekarang atau dimasa depan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi.⁴⁵

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada pasal 15 menjelaskan terkait kerja sama dalam pengelolaan objek wisata yang melibatkan pemerintah, non pemerintah dan masyarakat.⁴⁶

⁴⁴ Deden Saputra, *tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampong Wisata Berbasis Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 13, No 2 Juli 2020, hal.87.

⁴⁵ Deden Saputra, *tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampong Wisata Berbasis Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 13, No 2 Juli 2020, hal.88.

⁴⁶ Qanun Kabupaten Aceh jaya No 10 tahun 2019 Tentang pariwisata Halal.

Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon melibatkan kepala Desa Alue Jang sebagai bagian dari perangkat desa yang mempunyai peran sebagai fasilitator berperan memberikan atau menyediakan fasilitas yang mampu mencukupi kebutuhan kelompok sadar wisata. Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Aceh Jaya juga sebagai stakeholder yang mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata ada dan menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Selain itu Bank Aceh merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai mitra pemerintah Kabupaten Aceh jaya melalui program CSR, program ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata.

Pada pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon belum ada keterlibatan swasta yang berperan secara langsung, seluruh pelayanan yang menyangkut wisatawan disediakan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari pengelolaan dan pelaku wisata. Masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wisata membentuk forum musyawarah berupa kelompok sadar wisata. Tujuan dibentuknya forum ini adalah sebagai sarana dan media tukar informasi, komunikasi, dan kerjasama antara pengelola wisata dalam mengembangkan wisata itu sendiri. Dengan demikian memiliki tugas menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi pada wisata kepada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti amati bahwasanya dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata air terjun ceuraceu embon melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan melibatkan pemerintah setempat, Dinas Pemuda

dan Olahraga, Kelompok sadar wisata, masyarakat sekitar dan Bank aceh sebagai pembantu yang ikut berpartisipasi. Pada pembahasan ini, akan dijelaskan bagaimana proses kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon di Kabupaten Aceh Jaya.

4.2.1.1 Komunikasi/Dialog Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Dialog antar muka merupakan sarana yang memberikan suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang telah ditetapkan secara bersama. Adapun hasil dialog secara langsung yang dilakukan oleh informan yang terkait dilihat dari hasil wawancara dibawah ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua kelompok sadar wisata sebagai berikut :

“ bahwa awal mula ide atau gagasan pembentukan kelompok sadar wisata adalah karena dilihat semakin banyaknya pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan objek wisata namun belum ada yang mengelola sepenuhnya dengan baik, sehingga muncullah ide untuk membentuk suatu organisasi yang disebut dengan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sehingga setiap ada bantuan yang berikan dapat dikelola dengan baik oleh POKDARWIS ”⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa wisata air terjun ini perlu adanya pengelolaan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga pengelola membutuhkan sebuah kolaborasi demi terwujudnya tempat wisata tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh Qanun kabupaten aceh Jaya No 10 tahun 2019 Tentang Pariwisata halal pada pasal 15 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan objek wisata melibatkan pemerintah dan non pemerintah pada pelaksanaannya.⁴⁸ Kemudian selain Qanun tersebut Sudarmo dan Mutiarawati memaparkan bahwa *Collaborative Governance* adalah suatu usaha atau respon yang dilakukan oleh

⁴⁷ Wawancara dengan Maulidi, ketua kelompok sadar wisata pada tanggal 15 Juni 2022

⁴⁸ Qanun Kabupaten Aceh jaya No 10 tahun 2019 Tentang pariwisata Halal.

pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi.⁴⁹ Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat, dan lain-lain. Adapun langkah awal yang dilakukan yaitu mengadakan pertemuan langsung dengan pemerintah setempat untuk meminta izin pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon ini, seperti yang diungkapkan oleh kasi pemerintahan desa :

“ Setelah terbentuk POKDARWIS kemudian meminta izin kepada kepala desa Alue Jang untuk memberikan izin mengelola objek wisata air terjun ceuraceu embon dengan baik. Kemudian kepala desa mengadakan musyawarah besar dengan seluruh aparat desa serta masyarakat desa untuk membahas mengenai pemberian izin dan kerja sama dalam pengelolaan objek wisata tersebut ”⁵⁰

Dari hasil pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wisata air terjun ceuraceu embon ini harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan masyarakat sekitar karena yang membawa wisatawan adalah masyarakat sekitar. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari masyarakat tour guide sebagai berikut:

“setelah mengadakan musyawarah dengan aparatur pemerintah desa serta pengelola wisata jadi diwajibkan bagi setiap dari masyarakat yang membawa wisatawan yang berkunjung harus memberikan uang kepada Desa dan pengelolaan objek wisata sesuai dengan yang telah ditentukan, upaya tersebut dilakukan demi kelancaran dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon ”⁵¹

Dari pernyataan tersebut bahwa dalam pengelolaan wisata tidak lepas dari peranan pemerintah dan masyarakat sekitar demi memajukan wisata sehingga peranan pemerintah dan masyarakat ini sangatlah penting. dengan adanya

⁴⁹ Tika Mutiarawati dan Sudarmo, ”*collaborative governance dalam penanganan rob di kelurahan bandengan kota pekalongan*”, jurnal wahana publik, vol 1 N0.2.2017.hal.48-62

⁵⁰ Wawancara dengan Kuddi, Kasi pemerintahan desa pada tanggal 16 Juni 2022

⁵¹ Wawancara dengan asnita, masyarakat tour guide pada tanggal 18 Juni 2022

dukungan dari pemerintah dan masyarakat ini terlaksana kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata yang baik. *Collaborative governance* menurut Agrawal dan Lemos Subarsono mendefinisikan bahwa tidak hanya terbatas pada stekaholder yang terdiri dari lembaga pemerintah dan bukan pemerintah juga terbentuk atas adanya *multipartner governance* yang meliputi sektor privat/swasta, komunikasi sipil atau masyarakat dan dibangun sinergitas peran stekaholder dan mempunyai sebuah rencana kerjasama antara publik, private dan sosial.⁵² Setelah adanya dukungan tersebut terdapat tanggapan dari pemerintah tentang pengelolaan wisata yang diungkapkan oleh kasi pemerintahan desa dalam wawancara berikut ini :

“kami selaku masyarakat sekitar dan pemerintah setempat sangat mendukung adanya wisata ini karena dengan adanya wisata ini bisa menjadi tempat bagi masyarakat setempat maupun pengunjung wisata karena bisa menikmati liburan sambil belajar tentang alam. Dan dengan adanya wisata ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar”⁵³

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan ada dukungan yang diberikan dari pemerintah setempat kepada pengelola mengenai pengembangan wisata ini. Selain dukungan dari pemerintah, masyarakat juga memberikan dukungan karena berbagai manfaat yang diperoleh dari wisata ini. Hal ini diungkapkan juga oleh masyarakat tour guide sebagai berikut :

“kami sebagai masyarakat sangat senang dengan adanya kegiatan wisata ini. Wisata ini sangat bermanfaat bagi kami karena bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan juga bisa memberikan pengalaman baru bagi kami dalam membawa pengunjung berwisata sehingga pengunjung tertarik untuk berwisata berkali-kali ke air terjun ceuracee embon ”⁵⁴

⁵² Retno Sunu Astuti dkk, *Collaborative Governance Dalam perspektif Administrasi Negara* (Semarang :Universitas Diponegoro Press, 2020),hal. 42.

⁵³ Wawancara dengan Kuddi, kasi pemerintahan desa pada tanggal 16 Juni 2022

⁵⁴ Wawancara dengan Tono, masyarakat tour guide pada tanggal 18 Juni 2022

Setelah adanya tanggapan yang positif dari pemerintah dan masyarakat sekitar tentang pengelolaan dan pengembangan wisata ini, berikut wawancara dengan salah satu pengunjung mengenai objek wisata air terjun ceuraceu embon, sebagai berikut :

“wisata air terjun ceuraceu embon ini sangat bagus masih alami sekali belum ada sentuhan tangan manusia sedikit pun. Alamnya sejuk, bersih, sangat menarik bila kita berkunjung, rasanya tidak cukup sekali untuk berkunjung menikmati keindahan alamnya. Wisata air terjun memiliki keunikan tersendiri di bandingkan dengan wisata alam lainnya sehingga sangat tertarik untuk berkunjung kembali ”⁵⁵

Hal serupa juga di katakan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mengenai pengelolaan objek wisata ini berikut hasil wawancara :

“kami selaku pemerintah kabupaten sangat mendukung dengan adanya pengelolaan dan pengembangan objek wisata air terjun ceuraceu embon ini karena sangat bermanfaat yang diperoleh apabila objek wisata ini dikembangkan untuk masyarakat sekitar. Objek wisata ini memiliki potensi yang besar dan sudah dikenali banyak orang maka akan banyak pengunjung yang datang sehingga masyarakat sekitar bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menambah penghasilan ”⁵⁶

Kemudian hal serupa juga dikatakan oleh pihak Bank Aceh mengenai pengelolaan dan pengembangan objek wisata air terjun ceuraceu embon berikut hasil wawancara:

“kami selaku lembaga CSR cabang aceh jaya sangat mendukung penuh pengembangan objek wisata air terjun ceuraceu embon ini karena objek wisata ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sehingga dapat memajukan daerah dalam hal potensi wisata. Potensi wisata ini merupakan salah satu pendapatan daerah yang harus terus dikembangkan”⁵⁷

⁵⁵ Wawancara dengan Maulida, pengunjung pada tanggal 19 Juni 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Juanda, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Juni 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Adi, staf pegawai bank aceh pada tanggal 21 Juni 2022

Dari pernyataan diatas mengenai tanggapan dari beberapa pihak sangatlah baik dengan adanya pengelolaan dan pengembangan objek wisata ini. Dengan adanya objek wisata ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat seperti memperoleh lapangan kerja bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan sebuah negosiasi langsung agar masyarakat maupun pemerintah bisa terlibat dalam mengidentifikasi potensi wisata ini. Seperti yang diungkapkan oleh ketua kelompok sadar wisata , berikut ini :

“ maka dari itu kami pihak pengelola mengadakan sebuah pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat dan pemerintah agar bisa mengetahui potensi-potensi tentang wisata ini. Keterlibatan masyarakat maupun pemerintah dalam mengidentifikasi potensi wisata ini bisa memberikan sebuah kepercayaan penuh kepada pengelola wisata.. Dengan adanya musyawarah ini masyarakat maupun pemerintah bisa terlibat dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata ini agar semakin maju”⁵⁸

Dari beberapa hasil wawancara terkait dialog antar muka (*face to face*) secara langsung mengenai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan beberapa pihak lainnya mengadakan musyawarah dalam pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon di desa Alue Jang, Kabupaten Aceh Jaya.



58

Wawancara dengan Maulidi, ketua kelompok sadar wisata pada tanggal 15 Juni 2022

Gambar 4.2 Musyawarah Bersama

Sumber :Dinas pemuda dan Olahraga

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti amati bahwa komunikasi dalam pengelolaan objek wisata antar pemangku kepentingan sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya musyawarah yang dilakukan antara pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya dapat menyatukan berbagai pendapat sehingga dapat mengembangkan wisata.

4.2.1.2 Membangun Kepercayaan Dalam Pengelolaan Wisata

Proses kolaboratif tidak hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan merupakan fase terpisah dari dialog dan negosiasi hal yang substantif. Adapun yang dilakukan dalam membangun kepercayaan antara dinas pemuda dan olahraga dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaan dan pengembangan wisata berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh jaya Nomor 24 /SK/ Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Ceuraceu Embon oleh kepala Dinas pemuda dan Olahraga yang terkait dilihat dari hasil wawancara dibawah ini :

“setelah terbentuknya kelompok sadar wisata untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata air terjun ceuraceu embon maka dinas pemuda dan olahraga memberikan tugas berdasarkan SK kabupaten nomor 24 tahun 2021 kepada kelompok sadar wisata untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata air terjun ceuraceu embon yang maju kedepannya”⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling percaya diantara keduanya untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata air terjun

⁵⁹

Wawancara dengan Juanda, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Juni 2022

ceuraceu embon. Hal serupa juga diungkapkan oleh pihak Bank Aceh berikut hasil wawancaranya :

“untuk membangun kepercayaan antar pengelola kami pihak bank aceh melakukan survei langsung ke tempat wisata untuk melihat langsung bagaimana keadaan objek wisata tersebut apakah memang betul-betul membutuhkan sarana dan prasarana, jika memang membutuhkan akan kami berikan sarana dan prasarana tersebut demi berkembangnya objek wisata”⁶⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh kasi pemerintahan desa bahwa pernah dilakukan observasi untuk melihat langsung apakah wisata air terjun ceuraceu embon berhak menerima bantuan bot fiber dalam wawancara berikut :

“bahwasanya dari pihak pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan dan pengembangan wisata, itu mengadakan observasi lapangan untuk melihat bagaimana keadaan objek wisata dan juga memberikan dukungan penuh dalam pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon karena dukungan dari pemerintah itu sangat dibutuhkan”⁶¹

Dari beberapa hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses membangun kepercayaan dan mengelola wisata tersebut sudah cukup baik karena pemerintah yaitu dinas pemuda dan olahraga dan Bank Aceh telah melakukan kunjungan atau survei langsung ke tempat objek wisata untuk melihat langsung keadaan wisata. Dalam hal ini berarti pemerintah telah memberikan dorongan maupun kepercayaan untuk pengelola dalam mengembangkan wisata tersebut melalui sebuah pembinaan.

⁶⁰ Wawancara dengan Adi, Staf pegawai bank aceh pada tanggal 21 Juni 2022

⁶¹ Wawancara dengan Kuddi, kasi pemerintahan desa pada tanggal 16 Juni 2022



Gambar 4.3 Survei langsung dari DISPORA Dan Bank Aceh

Sumber : Dinas Pemuda Dan Olahraga

Selain dukungan atau kontribusi dari pemerintah, maka masyarakat sekitar juga berperan dalam pengembangan wisata ini seperti yang diungkapkan oleh masyarakat tour guide, berikut hasil wawancara :

“dari pihak masyarakat sendiri mengambil alih dalam hal membantu dan juga sebagai wadah fasilitator berupa tenaga, keamanan dalam membawa wisatawan yang ingin berkunjung itu memang sangat diperlukan karena lokasi yang ditempuh menuju ke tempat objek wisata air terjun ceuraceu embon itu sangat berbahaya dan juga memberi dukungan kepada pengelola wisata tersebut”⁶²

Selain kontribusi dari pemerintah dan masyarakat, pengunjung juga secara langsung memberikan kontribusi secara finansial yaitu sebesar Rp.1000.000/bot. kontribusi merupakan uang masuk bagi pengunjung wisata. seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengunjung sebagai berikut :

“setiap yang wisatawan yang berkunjung baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan manvanegara wajib memberikan uang masuk atau membayar tiket untuk berkunjung ke tempat wisata secara finansial yaitu sebesar

⁶²

Wawancara dengan Suharta, masyarakat tour guide pada tanggal 17 Juni 2022

Rp.1000.000, hal ini merupakan salah satu kontribusi kami dalam mendukung, membantu dalam tahap pengembangan wisata ini”⁶³

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan baik ataupun kontribusi yang sangat baik yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat dan pengunjung dalam hal mengembangkan wisata tersebut. Adapun data pengunjung sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Kunjungan Wisatawan Air Terjun Ceuraceu Embon Tahun 2021

No	Bulan	Wisatawan Mancanegara (AS)	Wisatawan Nusantara (DM)
1	Januari	6	57
2	Februari	4	68
3	Maret	8	56
4	April	-	68
5	Mei	-	82
6	Juni	-	71
7	Juli	-	113
8	Agustus	-	59
9	September	-	74
10	Oktober	-	33
11	November	-	32
12	Desember	-	18
Total		18	852

Sumber : Dinas pemuda dan Olahraga

Dari data diatas tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 masing kurang pengujung yang datang karena pada tahun ini baru dimulainya pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon. Selain kontribusi yang diberikan tersebut tidak lepas dari rasa kepercayaan yang telah diberikan agar dalam pengembangan wisata ini berjalan sesuai dengan rencana. Seperti yang dikemukakan oleh kepala Dians pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

“bahwa dalam membangun sebuah kepercayaan antara pemerintah, pengelola maupun masyarakat maka pemerintah mengadakan sebuah sosialisasi untuk pembinaan pengembangan wisata tersebut sehingga apabila ada kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan pengembangan bisa dicarikan solusi dan diatasi secara bersama”⁶⁴

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan wisata ini telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan karena adanya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah untuk memberikan pembinaan terkait pengelolaan dan pengembangan wisata ini. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada pasal 23-23 menjelaskan bahwa perlu adanya pembinaan terhadap penyelenggaraan pariwisata halal.⁶⁵

⁶⁴

Wawancara dengan Juanda, kepala dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Juni 2022

⁶⁵

Qanun Kabupaten Aceh jaya No 10 tahun 2019 Tentang pariwisata Halal.



Gambar 4.4 Sosialisasi dan Pembinaan Dari Pemerintah

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

Namun dalam proses sebuah pengembangan kearah yang lebih baik tidak sedikit dari proses tersebut mengalami sebuah kendala seperti yang diungkapkan oleh pengelola wisata tersebut, dari hasil wawancara dengankelompok sadar wisata sebagai berikut :

“pada awal pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon ini memang masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal proses pengelolaan dan pengembangan. Banyak yang tidak peduli betapa penting mengembangkan potensi wisata yang ada”⁶⁶

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan wisata ini tidak serta merta terwujud begitu saja akan tetapi banyak melalui perbincangan dan kendala terutama mengenai fasilitas yang belum memadai, sarana transportasi yang belum ada. Namun setiap kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya kepercayaan diantara berbagai pihak.

⁶⁶

Wawancara dengan Maulidi, ketua kelompok sadar wisata pada tanggal 15 Juni 2022

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti amati mengenai membangun kepercayaan (*trust building*) yang dilakukan dalam proses kolaborasi pengembangan wisata antara dinas pemuda dan olahraga serta kelompok sadar wisata bahwa, telah terbangun suatu kepercayaan dengan sangat baik antara pemerintah, masyarakat dan juga pengelola karena awal mulanya objek wisata air terjun ceuraceu embon ini belum dikelola dan sekarang telah dikelola dengan baik. Dengan adanya sosialisasi serta pembinaan secara langsung dan juga penjelasan mengenai berbagai manfaat yang akan didapatkan maka masyarakat memberikan kepercayaan penuh untuk pengelolaan dan pengembangan wisata tersebut kepada pengelola. Kemudian dari pemerintah telah memberikan kepercayaan untuk pengelola dengan menyediakan beberapa sarana berupa bot fiber

4.2.1.3 Komitmen Pada Proses Kolaborasi Pengelolaan Wisata

Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan tawar menawar itikad baik untuk saling menguntungkan cara terbaik mencapai kebijakan yang diinginkan dan membutuhkan kesediaan untuk melaksanakan musyawarah. Dalam hal ini terdapat sarana yang digunakan untuk menyampaikan control guna mengawasi jalannya kegiatan wisata ini seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“terkait adanya kolaborasi yang telah dilakukan antara pemerintah dan pengelola maka terlebih dahulu dibangun komitmen yang baik maka dari itu dalam tahap pengembangan wisata ini pemerintah memberikan sarana yang disediakan yaitu sebuah bot fiber untuk membawa para wisatawan yang ingin berkunjung”⁶⁷

Hal sama pun diungkapkan oleh pihak Bank Aceh, berikut hasil wawancara : “seperti yang dikatakan tadi bahwasanya jika terdapat kendala atau permasalahan

⁶⁷ Wawancara dengan juanda, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Juni 2022

apapun itu ada tempat sosialisasi secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal pengelolaan dan pengembangannya wisata air terjun ceuraceu embon dan kami dari pihak bank aceh bersedia untuk membantu”⁶⁸

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan wisata ini terdapat wadah yang digunakan apabila terdapat kendala yang dihadapi oleh pengelola yaitu melalui musyawarah untuk menyampaikan pendapat guna mengawasi jalannya pengembangan wisata. Setelah adanya sarana yang digunakan maka proses monitoring juga diperlukan. Keterlibatan masyarakat maupun pemerintah dalam kegiatan ini sangat penting dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangannya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansel memaparkan bahwa *collaborative governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepakatan yang sama terhadap suatu masalah, tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain.⁶⁹ Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama terhadap setiap proses kolaborasi seperti yang diungkapkan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

“seperti halnya dalam menyediakan sarana dan prasarana yaitu berupa bot fiber maka hal ini merupakan monitoring didalam proses pengembangan wisata juga melalui musyawarah yang dilakukan antara pemerintah, masyarakat maupun pengelola dan sesekali kami juga melakukan kunjungan untuk mengetahui bagaimana perkembangan wisata ini”⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam hal membangun komitmen antara pemerintah dan pengelola sudah baik karena telah menyediakan sarana transportasi guna untuk kelancaran proses pengembangan wisata.

⁶⁸ Wawancara dengan Adi, staf pegawai bank aceh pada tanggal 21 Juni 2022

⁶⁹ Retno Sunu Astuti dkk, *Collaborative Governance Dalam perspektif Administrasi Negara* (Semarang :Universitas Diponegoro Press, 2020),hal.75.

⁷⁰ Wawancara dengan Juanda, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Juni 2022

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh jaya No 10 tahun 2019 Tentang pariwisata halal pada pasal 8 menjelaskan bahwa pemerintah/pengelola harus menyediakan fasilitas transportasi dalam mendukung aktifitas pariwisata.⁷¹



Gambar 4.5 Pemberian Bot Fiber

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Selain sarana yang digunakan untuk menyampaikan control dan juga monitoring. Pengelolaan sarana dalam pengembangan wisata ini juga sangat diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh ketua kelompok sadar wisata berikut :

“dalam hal pengelolaan dan pengembangan wisata ini kami ikut melibatkan masyarakat sekitar untuk mewujudkan keamanan disekitar tempat wisata serta keamanan bagi pengunjung karena keamanan pengunjung itu sangat diharapkan, dan ketertiban bagi wisatawan yang melakukan aktivitas berwisata di air terjun ceuraceu embon”⁷²

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam tahap pengelolaan dan pengembangan sudah baik karena dalam hal ini masyarakat sekitar diikut sertakan sehingga mewujudkan kolaborasi yang baik. Akan tetapi meskipun masyarakat

⁷¹ Qanun Kabupaten Aceh jaya No 10 tahun 2019 Tentang pariwisata Halal.

⁷² Wawancara dengan Maulidi, ketua kelompok sadar wisata pada tanggal 15 Juni 2022

ikutserta dalam pengelolaan dan pengembangan, sarana dan prasarana belum cukup memadai, seperti yang diungkapkan oleh masyarakat sekaligus pengunjung objek wisata sebagai berikut :

“fasilitas dan aksesibilitas memang belum sampai pada tahap penyelesaian karena masih belum lengkap. Seperti belum adanya fasilitas mushola, MCK, pondok santai, akses jalan menuju tempat objek wisata itu memang belum memadai dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya yang belum mencukupi”⁷³

Dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini sarana dan prasarana yang digunakan belum memadai sehingga perlu diadakan sebuah kegiatan evaluasi guna mengetahui bagaimana pengembangan wisata yang ada. Maka dari itu harus ada tindak lanjut dari sebuah proses pengembangannya. Seperti yang diungkapkan oleh ketua kelompok sadar wisata sebagai berikut :

“untuk kegiatan evaluasi bagaimana perkembangan wisata itu pernah diadakan seperti adanya kegiatan musyawarah ataupun pembinaan yang dilakukan. Akan tetapi meskipun ada pembinaan yang dilakukan akan tetapi tetap masih belum bagus karena sarana/prasarana dan sumber daya manusia yang kurang dalam hal pengelolaan dan pengembangan wisata”⁷⁴

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan terkait komitmen terhadap proses kolaborasi antara dinas pemuda dan olahraga dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di Desa Alue Jang, Kecamatan pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya bahwa komitmen belum dilaksanakan secara maksimal karena dalam hal ini masih banyak kebutuhan seperti fasilitas dan aksesibilitas. Akan tetapi dalam proses pengelolaan dan pengembangan telah melibatkan masyarakat untuk mewujudkan keamanan, dan

⁷³ Wawancara dengan Rizky, pengunjung pada tanggal 18 Juni 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Maulidi, ketua kelompok sadar wisata pada tanggal 15 Juni 2022

ketertiban. Kemudian pemerintah telah melakukan musyawarah, pembinaan dan juga melakukan promosi objek wisata air terjun ceuraceu embon ini.

4.2.1.4 Pemahaman Bersama Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Pemahaman atas keputusan bersama menyatakan persetujuan definisi masalah berarti persetujuan tentang pengetahuan yang relevan diperlukan untuk mengatasi masalah. Pengelolaan dan pengembangan atas keputusan bersama dapat dilaksanakan dalam proses kolaborasi dan berguna untuk menilai sejauh mana pembelajaran kolektif yang dihasilkan dari kolaborasi. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal pada pasal 23-26 menjelaskan bahwa perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap kegiatan wisata yang dilakukan.⁷⁵ Oleh karena itu perlu adanya suatu interaksi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat agar dapat diketahui sejauh mana proses kolaborasi yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga berikut :

“interaksi seperti melakukan musyawarah maupun pembinaan mengenai pengelolaan dan pengembangan wisata secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat sudah ada dan terlaksanakan dengan baik, memang dalam hal mengelola dan mengembangkan potensi wisata sangat dibutuhkan interaksi antara satu sama lain untuk menyatukan pendapat-pendapat yang ada”⁷⁶

Sebagaimana yang telah dikatakan tersebut bahwasanya interaksi antara pemerintah maupun masyarakat sudah baik. Dengan adanya interaksi secara langsung ini pula dapat menyatukan sebuah pendapat demi mencapai visi dan misi

⁷⁵ Qanun Kabupaten Aceh jaya No 10 tahun 2019 Tentang pariwisata Halal.

⁷⁶ Wawancara dengan Juanda, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Juni 2022

bersama dalam pengelolaan dan pengembangan wisata ini. Hal tersebut dikatakan oleh ketua kelompok sadar wisata sebagai berikut :

“melalui musyawarah atau pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan masyarakat serta pengelola disini membahas bagaimana visi dan misi bersama untuk kelancaran dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Tidak akan maju segala sesuatu tanpa adanya visi dan misi yang harus dilakukan bersama”⁷⁷

Seperti halnya interaksi dan musyawarah untuk menyatukan visi dan misi bersama untuk pengembangan objek wisata ini. Maka diperlukan juga sebuah sarana atau media untuk digunakan dalam kegiatan sosialisasi. Namun dalam hal penyediaan sarana atau media tersebut belum cukup memadai karena kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh kasi pemerintahan desa sebagai berikut :

“sosialisasi seperti pembinaan sudah pernah dilakukan tapi cuma sekali-kali. Jadi, tidak selalu dilakukan. Itupun ada kegiatan sosialisasi kalau diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Tapi untuk musyawarah antara pengelola dengan masyarakat sering lakukan untuk membahas bagaimana perkembangan wisata apakah ada wisatawan yang bertambah dalam berkunjung”⁷⁸

Dalam hal sarana atau media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi memang belum cukup memadai karena belum dilakukan secara bertahap sehingga pengelolaan dan pengembangannya pun belum secara maksimal akan tetapi meskipun sarana ini belum maksimal tetapi akan tetap ada langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat agar wisata ini bisa diwujudkan sesuai dengan visi misi bersama. Hal ini diungkapkan oleh kepala Dinas pemuda dan Olahraga berikut :

⁷⁷ Wawancara dengan Kuddi, kasi pemerintahan desa pada tanggal 16 Juni 2022

⁷⁸ Wawancara dengan Maulidi, ketua kelompok sadar wisata pada tanggal 15 Juni 2022

“pemerintah mengadakan promosi wisata ini agar bisa dikenal banyak orang baik melalui media sosial maupun media yang lainnya sehingga ketika pengunjung datang ada kontribusi yang diberikan dari pihak pengunjung digunakan untuk pengembangan kegiatan wisata yang lebih maju dan semakin dikenal khalayak ramai”⁷⁹

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun media sosialisasi belum secara maksimal akan tetapi ada langkah lain yang dilakukan pemerintah agar kegiatan pengembangan wisata ini tetap bisa diwujudkan sesuai visi dan misi bersama. Namun dengan adanya langkah yaitu mengadakan promosi harus ada pula bentuk forum tertentu yang digunakan antara pemerintah dengan pengelola untuk membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan wisata ini, seperti yang dikatakan oleh kelompok sadar wisata dalam wawancara berikut ini :

“kalau forum tertentu untuk saat ini belum ada akan tetapi akan direncanakan kalau masalah pembinaan pengembangan wisata sudah pernah dilakukan untuk semua pengelola objek wisata termasuk pengelola wisata air terjun ceuraceu embon disebut kelompok sadar wisata ceuraceu embon”⁸⁰

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan terkait pemahaman bersama (*shared understanding*) untuk menilai sejauh mana proses dari kolaborasi yang dihasilkan antara dinas pemuda dan olahraga dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di Desa Alue jang, Kabupaten Aceh Jaya dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata ini sudah berjalan dengan baik karena pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin seperti mengadakan musyawarah dan mempromosikan objek wisata air terjun ceuraceu embon untuk dikenal banyak orang baik itu lokal maupun mancanegara. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh jaya No 10 Tahun 2019 tentang

⁷⁹ Wawancara dengan Juanda, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Juni 2022

⁸⁰ Wawancara dengan Maulidi, ketua kelompok sadar wisata pada tanggal 15 Juni 2022

Pariwisata Halal pada pasal 19 dan 20 menjelaskan bagaimana pemerintah/pengelola dalam melakukan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal serta strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi pariwisata halal.⁸¹



Gambar 4.6 Wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal

Sumber : Dinas pemuda dan Olahraga

Meskipun masih ada kekurangan akan tetapi kekurangan tidak menjadi hambatan untuk pengembangannya karena selama proses kolaborasi ini terdapat forum musyawarah maupun pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan promosi yang dilakukan juga sudah sangat baik hal ini juga dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang selalu bertambah menandakan bahwa wisata ini sudah dikenal dimana-mana.

4.2.1.5 Dampak Sementara Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Dampak sementara atau intermediate outcomes adalah output dari kegiatan usaha yang diidentifikasi dan diukur dalam waktu yang singkat, serta merupakan bagian dari indikator hasil jangka panjang. Dampak dari kerja sama

⁸¹ Qanun Kabupaten Aceh jaya No 10 tahun 2019 Tentang pariwisata Halal.

yang terjadi pada pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon saat ini memberikan dampak yang cukup baik untuk perkembangan wisata dan unsur di dalamnya. Hal ini diungkapkan oleh ketua kelompok sadar wisata berikut :

“berbicara dampak sementara yang dicapai selama pengelolaan wisata air terjun ceuraceu embon adalah adanya bantuan dari pemerintah kabupaten dan juga bank aceh yang memberikan bot fiber sebagai sarana transportasi untuk pengembangan air terjun ceuraceu embon dan pemerintah juga akan mencari solusi untuk kendala-kendala apa saja yang sedang dialami. Begitu juga dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon”⁸²

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi yang dilakukan dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon.



Gambar 4.7 bot Fiber

Sumber : Dinas pemuda dan Olahraga

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti amati bahwa Dampak dari kolaborasi yang dilakukan pada pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon selama ini memberikan dampak multifier effect yang cukup baik untuk perkembangan wisata. Semua itu tercapai dengan adanya keterlibatan pemerintah, masyarakat, maupun lembaga lainnya yang ikut serta dalam pengelolaan serta pengembangan wisata. Dengan adanya pembinaan dan surveillance yang dilakukan oleh pemerintah dinas pemuda dan olahraga kabupaten Aceh Jaya membuat peningkatan dalam memajukan potensi wisata yang ada. Kerjasama yang sedang berjalan dalam pengelolaan dan pengembangan wisata menghasilkan peningkatan untuk masyarakat maupun untuk wisata itu sendiri dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung. Dari pelayanan yang diberikan tersebut memberikan fee back berupa peningkatan wisatawan yang berkunjung ke wisata air terjun ceuraceu embon. Berikut merupakan data kolaborasi dari masing-masing pihak yang terkait dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon :

Tabel 4.4

Data kolaborasi masing-masing pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon

No	Pihak-pihak yang terkait	Bentuk kolaborasi	keterangan
1	Dinas pemuda dan olahraga	Melakukan musyawarah dan pembinaan kepada pengelola dan masyarakat yang menjadi penggerak dalam suatu wisata	Untuk mengetajui kendala yang dihadapi
		Melakukan promosi objek wisata air terjun ceuraceu embon	Promosi pada media sosial atau tamu yang datang di

			lingkup pemerintah daerah
		Memberikan bantuan untuk pengembangan wisata	1 unit bot fiber
2	Bank aceh	Memberikan bantuan untuk pengembangan wisata	1 unit bot fiber
3	Kelompok sadar wisata	Mengelola wisata air terjun ceuraceu embon	Pengelolaobjek wisata
4	Kepala desa alue jang	Memberikan bantuan dan membantu dalam pengelolaan wisata air terjun ceuraceu embon	Kantor sekretariat untuk segala jenis urusan administrasi wisat
5	Masyarakat tour guide	Membawa wisatawan yang berkunjung serta menjaga keamanan ketertiban dalam berwisata	Pembawa wisatawan
6	Pengunjung/wisatawan	Pemasukan secara finansial sebesar Rp.1000.000 untuk 1 bot pengunjung	Untuk pengelolaan dan pengembangan wisata

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara para informan

4.2.2 Kendala Dalam Pengelolaan

Kendala merupakan faktor yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan. Faktor kendala ini merupakan suatu hal yang menjadi rintangan dalam pencapaian suatu tujuan baik tujuan individu maupun tujuan kelompok. Jika kita kaitkan dengan proses pengelolaan dan pengembangan wisata, maka kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Transportasi

Transportasi merupakan salah satu prasarana yang mesti ada demi kelancaran dalam proses pengelolaan dan pengembangan objek wisata.

Pada wisata air terjun ceuraceu embon masih minimnya transportasi, hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan wisata. Seperti yang dikatakan oleh ketua kelompok sadar wisata sebagai berikut:

“transportasi yang dimiliki pada objek wisata air terjun ceuraceu embon memang masih sedikit. Akan tetapi akan di usahakan untuk mendapatkan transportasi yang mencukupi seperti yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata air terjun ceuraceu embon.”⁸³

Dari wawancara tersebut menyatakan bahwa transportasi pada objek wisata air terjun ceuraceu embon memang masih minim dan sangat membutuhkan transportasi untuk membawa wisatawan yang ingin berkunjung ke air terjun ceuraceu embon.

2. Usaha makanan

Pada wisata air terjun ceuraceu embon belum adanya usaha makanan dan minuman yang disediakan. Bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke objek wisata air terjun ceuraceu embon harus membawa sendiri makanan dan minuman yang dibutuhkan seperti wawancara dengan seorang pengunjung sebagai berikut :

“di tempat objek wisata air terjun ceuraceu embon belum menyediakan makanan maupun minuman jadi kami harus membawa sendiri makanan jika ingin makan disana”⁸⁴

Berdasarkan wawancara tersebut menyatakan bahwa bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke objek wisata air terjun ceuraceu embon harus

⁸³ Wawancara dengan Maulidi, ketua kelompok sadar wisata pada tanggal 15 Juni 2022

⁸⁴ Wawancara dengan risky, pengunjung pada tanggal 18 Juni 2022

membawa sendiri kebutuhan seperti makanan dan minuman karena disana tidak ada usaha makanan dan minuman.

3. Pondok santai

Wisata air terjun ceuraceu embon belum menyediakan pondok santai bagi pengunjung yang ingin beristirahat di objek wisata. Pondok santai memang sangat dibutuhkan pada objek wisata air terjun ceuraceu embon karena dikhawatirkan jika cuacanya hujan para pengunjung tidak ada tempat untuk berteduh seperti yang dikatakan oleh seorang pengunjung sebagai berikut :

“pondok santai pada wisata air terjun ceuraceu embon memang belum disediakan jadi kami kalau cuacanya hujan langsung basah terus karena tidak ada tempat untuk berteduh dan kalau pun cuacanya panas juga tidak ada tempat untuk berteduh”.⁸⁵

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya pondok santai pada objek wisata air terjun ceuraceu embon memang sangat di butuhkan bagi pengunjung yang datang. Sering kali kalau cuacanya tidak bagus jadi pengunjung tidak ada tempat untuk berteduh. Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwasanya dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon masih terdapat beberapa kendala seperti minimnya transportasi, tidak adanya usaha makanan dan minuman yang terdapat pada objek wisata, dan belum adanya pondok santai yang disediakan untuk pengunjung wisata.

⁸⁵

Wawancara dengan Maulida, pengunjung pada tanggal 18 Juni 2022

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

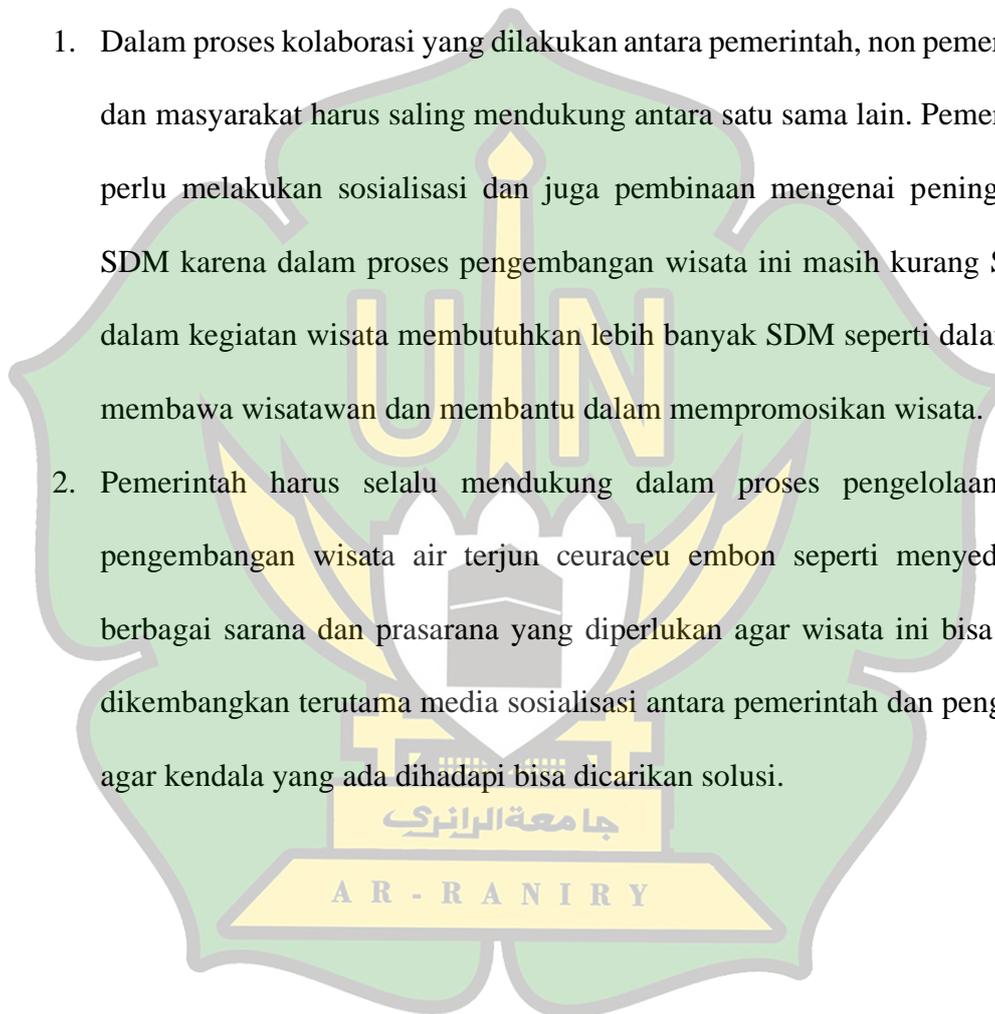
Berdasarkan hasil penjelasan pada bab sebelumnya bahwa fokus penelitian ini merupakan pada kolaborasi dalam pengelolaan dan kendala dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon di kabupaten Aceh Jaya.

1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal menyatakan bahwa Kolaborasi dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata melibatkan beberapa pihak pemangku kepentingan seperti pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat. Dalam kolaborasi terdapat proses sebagai berikut : komunikasi dalam pengelolaan objek wisata, membangun kepercayaan dalam proses pengelolaan, komitmen dalam proses pengelolaan, pemahaman bersama mengenai pengelolaan, dan dampak yang dihasilkan selama proses kolaborasi dilakukan.
2. kendala yang sedang dihadapi adalah kurangnya transportasi dari pemerintah disebabkan karena banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh daerah sehingga sering kali transportasi yang diperlukan kurang mencukupi. Belum adanya usaha makanan dan minuman ditempat objek wisata serta tidak adanya pondok santai yang disediakan untuk pengunjung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ceuraceu Embon Di Kabupaten Aceh Jaya, maka dari itu peneliti menyarankan :

1. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, non pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung antara satu sama lain. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan juga pembinaan mengenai peningkatan SDM karena dalam proses pengembangan wisata ini masih kurang SDM, dalam kegiatan wisata membutuhkan lebih banyak SDM seperti dalam hal membawa wisatawan dan membantu dalam mempromosikan wisata.
2. Pemerintah harus selalu mendukung dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata air terjun ceuraceu embon seperti menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan agar wisata ini bisa terus dikembangkan terutama media sosialisasi antara pemerintah dan pengelola agar kendala yang ada dihadapi bisa dicarikan solusi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Conny R.Semiawan,(2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo;
- Enza Resdiana, Tita Tanjung Sari, 2020, *Penguatan Triple Helix Pada Sektor Pariwisata*. Universitas wiraraja Sumenep;
- Gusti Bagus Rai Utama, (2014), *Pengantar Industri Pariwisata*, Yogyakarta: CV Budi Utama;
- Is Darmanto, (2016), *Dasar Dasar Kepariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Yogyakarta: Perpus.Univpancasila.Ac.Id;
- J.R. Raco, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: Jaya Utama;
- Notoatmodjo, and M M.A,(2018) “*Metodologi Penelitian.*” *Rake Sarasin*. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Muhammad Idrus, (2009), *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga;
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta;
- Retno Sunu Astuti, Hardi warsono, (2020), *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro press jalan Erlangga Barat VII No. 35 Semarang;
- Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Pnelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta;
- Suwena Ketut, Gusti Ngurah Widyatmaja, (2017), *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Buku*. Denpasar, Bali: Pustaka Lasaran;

Jurnal

- Aeni, Zahratul, and Retno Sunu Astuti. “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan.” *Conference on Public Administration and Society* 01 (2019): 92–118.
- Andi Hariadi. “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Arrasyid, Muhammad Aziz. “Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.” *Journal Publicuho* 4, no. 3 (2021): 913–924.

Ayu Karlina. “Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Aceh Jaya.” *Skripsi* (2019): 1–66. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10165/>.

Deden Saputra, *tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampong Wisata Berbasis Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 13, No 2 Juli 2020.

Fauzi, Usman. “Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda aceh, 2020.

Khairul Amri Assidiq. “Peran POKDARWIS Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Halal Di Desa Setanggor.” *Journal Magister unran* Vol. 10, N (2021): 61.

Oktaviantari, Ni Putu Eka, Damiati Damiati, and Ni Made Suriani. “Potensi Wisata Alam Air Terjun Kuning Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Di Kawasan Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.” *Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 10, no. 2 (2019): 136.

Septian, windy Aswin. “Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga (DIPORA) Dalam Pembinaan Atlet Di Kota Samarinda.” *Journal Ilmu Pemerintahan* Volume 5 (2017): 394.

Sugiyono. “Prosedure Penelitian.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–1699.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Republik, Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, and Kabupaten Nagan. “Dan Budaya Yang Dimiliki Kabupaten Aceh Jaya Merupakan Sumber Daya Dan Modal Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Sebagaimana Terkandung Dalam Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataa n , Pemerintah Kabupaten Aceh,” no. 6 (2019).

Qanun Kabupaten Aceh jaya No.10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.

Wawancara

Wawancara dengan kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya

Wawancara dengan staf pegawai Bank Aceh Kabupaten Aceh Jaya

Wawancara dengan ketua kelompok sadar wisata ceuraceu embon

Wawancara dengan kasi pemerintahan Desa Alue Jang

Wawancara dengan masyarakat tour guide Desa Alue Jang

Wawancara dengan pengunjung wisata air terjun ceuraceu embon



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5. 1 Surat Keputusan Dekan Fisip

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1098/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **11 April 2022**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Bustami Usman, S.AP., S.H., M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi
 Nama : Novia Elisa
 NIM : 180802080
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ceuraceu Embori Di Kabupaten Aceh Jaya
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor
 Dekan

 Ermita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 5. 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1344/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas pemuda dan olahraga penerima 1
2. bank aceh penerima 2
3. kelompo sadar wisata (POKDARWIS) penerima 3

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Novia elisa / 180802080**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Aceh jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon di kabupaten aceh jaya*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 07 Juni 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember

Lampiran 5. 3 Surat Hasil Penelitian dari DISPORA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA
 Jl. Pinto Sa Dalam No. 69 Kuala Meurisi – Calang Tel/ Fax. (0654) 2215918
 email : disporapar.acehjaya@gmail.com.

CALANG Kode Pos : 23654

Nomor : 556/124/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Selesai Penelitian.

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Pemerintahan
 Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan UIN Ar-Raniry
 di –
Banda Aceh

1. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya dengan ini menerangkan :

Nama : Novia elisa
 Nim : 180802080
 Semester/Jurusan : VIII/Ilmu Administrasi Negara
 Alamat Sekarang : Aceh Jaya

Benar yang tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian ilmiah mahasiswa dalam rangka penulisan Skripsi dari tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2022 dengan Judul *“Collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceurace embon di kabupaten Aceh Jaya”*.

2. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calang, 26 Juni 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
 KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA
 KABUPATEN ACEH JAYA

(Signature)
IUANDA, S.Pd.I.M.Pd
 Pembina Tk.I/NIP. 197806162003121006



Lampiran 5. 4 Surat Hasil Penelitian dari Bank Aceh



Nomor : 1062/Clg.01/VI/2022
Lampiran : -

Calang, 28 Juni 2022

Kepada Yth,
Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
di -
Banda Aceh

Perihal : Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa Atas Nama Novia Elisa (180802080)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam teriring do'a semoga Saudara senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Sehubungan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Nomor: B-1344/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dapat kami sampaikan bahwa:

Nama/NIM : Novia Elisa / 180802080
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Aceh Jaya

Saudari yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Calang, dengan menggunakan metode wawancara atau interview dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul *Collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata air terjun ceuraceu embon di Kabupaten Aceh Jaya.*

Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

AR - RANIRY

PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG CALANG

T.M. Andika Putra
Pemimpin

KANTOR CABANG CALANG :

Jalan Banda - Aceh Meulaboh Ds. Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya
Telp. (0654) 2210021 - 2210023 Fax (0654) 2210022

Lampiran 5. 5 Surat Hasil Penelitian dari POKDARWIS



POKDARWIS CEURACEU EMBOEN
 Alamat Sekretariat : Jl. Teunom Sarah Raya KM. 26
 Gampong Alue Jang Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya
 Kode Pos : 23653, CP : 0822-1508-6366

Alue Jang, 27 Juni 2022

Nomor : 814/13/VI/2022
 Perihal : **Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada YTH,
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
 Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
 Di-
 Banda Aceh

1. Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Ceuraceu Emboen dengan ini menerangkan :

Nama : **Novia Elisa**
 NIM : 180802080
 Semester : VIII
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Gampong Alue Jang, Kecamatan Pasie Raya
 Kabupaten Aceh Jaya

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka penulisan Skripsi mulai pada tanggal 15 s.d 26 Juni 2022 dengan Judul "Collaborative governance dalam pengelola Objek Wisata Air Terjun Ceuraceu Emboen di Kabupaten Aceh Jaya"

2. Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua,



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5. 6 Surat Hasil Penelitian Dari Kepala Desa Alue Jang



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN PASIE RAYA
KEUCHIK ALUE JANG
 Jalan Teunom- Sarah Raya Km. ...
ALUE JANG

Kode Pos. 23653

Alue Jang, 27 Juni 2022

Nomor : 556/ /2022
 Lampiran : ~
 Perihal : Hasil Penelitian

Kepada Yth ;
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Pemerintahan
 Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan UIN Ar- Raniry
 Di~

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya Nomor 556/124/2022 Perihal Selesai Penelitian dengan ini Menerangkan bahwa;

Nama : NOVIA EIISA
 Nim : 180802080
 Semester Jurusan : VIII/Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Aceh Jaya

2. Benar yang tersebut Namanya diatas telah selesai melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka penelitian Skripsi dari tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2022 dengan Judul – *Callaborative governance* dalam pengelolaan objek *Wisata Air Terjun Ceurace embon* di Gampong Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.
3. Demikian surat ini kamsampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY



Lampiran 5. 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PARIWISATA HALAL

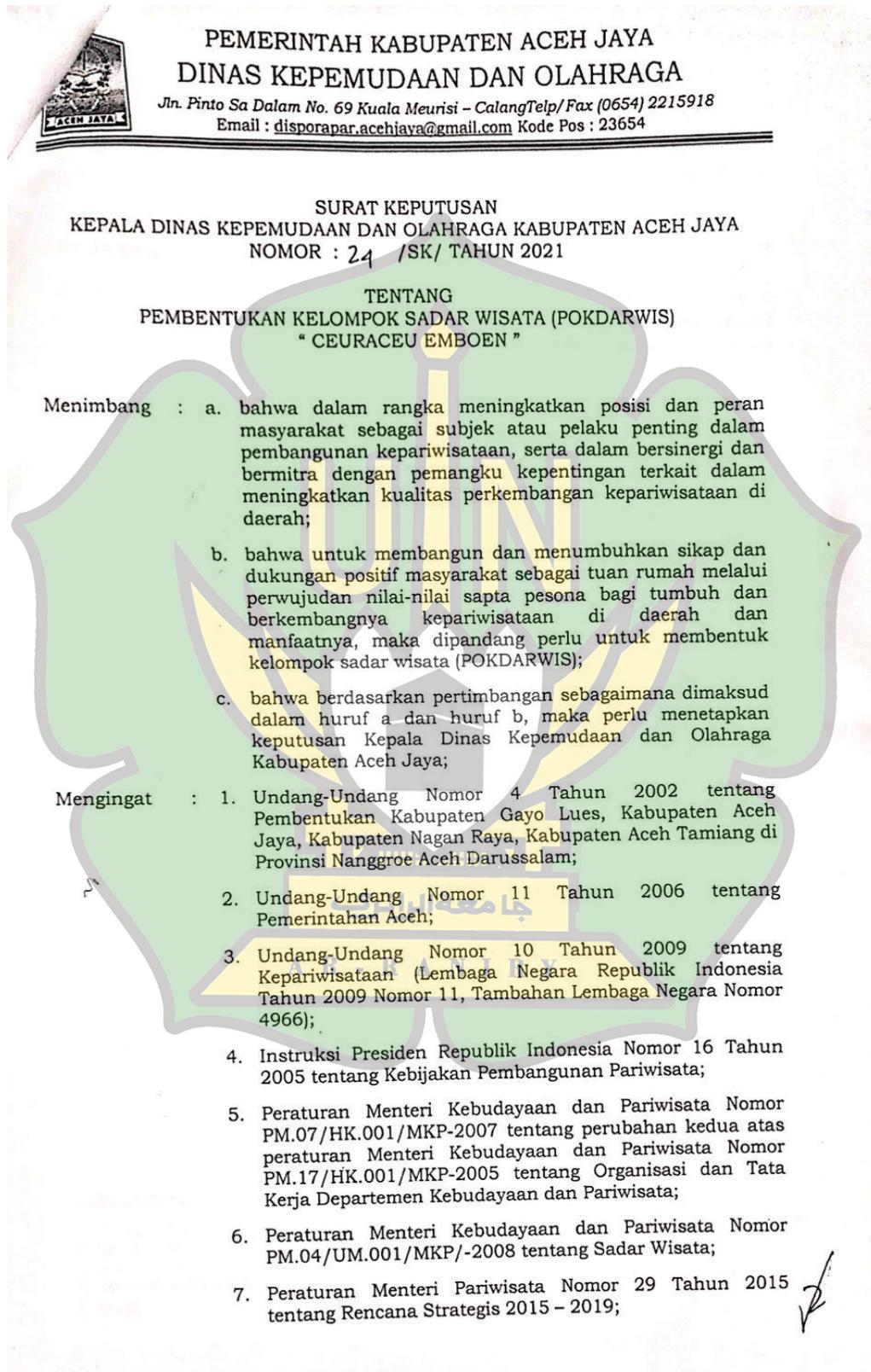
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Allah SWT serta peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Aceh Jaya merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pariwisata Halal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Lampiran 5. 8 SK Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga



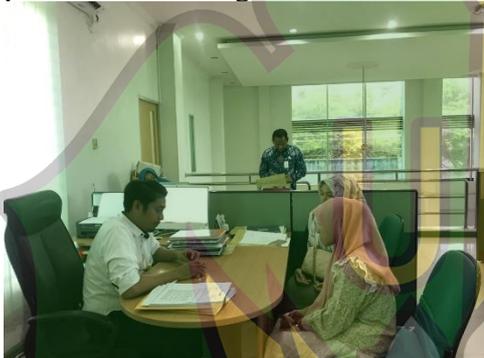
Lampiran 5. 9 Dokumentasi Saat Penelitian



Wawancara dengan kepala dinas pemuda dan olahraga



Wawancara dengan ketua kelompok sadar wisata



Wawancara dengan staf bank aceh



Wawancara dengan masyarakat tour guide



Wawancara dengan kasi pemerintahan desa alue jang



Wawancara dengan pengunjung